

**ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN
MARISO KOTA MAKASSAR**

***ANALYSIS OF PREVENTION AND IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF
SLUM RESIDENTIAL AREAS IN MARISO DISTRICT, MAKASSAR CITY***



**A. MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYATULLAH
105851102320**

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana PWK (S.PWK) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Judul Skripsi : **ANALISIS PENCENGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**

Nama : 1. A. Muhammad Taufiq Hidayatullah

Stambuk : 1. 105 85 11023 20

Makassar, 11 September 2025

Telah Diperiksa dan Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing;

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Firdaus, ST., MT., MSi., IAP., IPM., ASEAN. Eng Ir. Nini Apriani Rumata, ST., MT

Mengetahui,

Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ir. Nini Apriani Rumata, ST., MT., IPM

NBM : 1354 185





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN

Skripsi atas nama **A. Muhammad Taufiq Hidayatullah** dengan nomor induk Mahasiswa 105 85 11023 20, dinyatakan diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir/Skripsi sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK-Y/35201/091004/2025, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana PWK pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu, 30 Agustus 2025.

Panitia Ujian :

Makassar, 19 Rabiul Awal 1447 H
11 September 2025 M

1. Pengawas Umum

a. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU

b. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Eng. Muhammad Isran Ramli, ST., MT.

2. Penguji

a. Ketua : Andi Annisa Amalia, ST., M.Si

b. Sekretaris : Zulkifli, SSi., Msi

3. Anggota

1. Lucke Ayurindra Margie D., ST., MSi

2. M. Nurhidayat, ST., MT.

3. Soemitro Emin Praja, ST., MSi

Mengetahui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. Firdaus, ST., MT., MSi., IAP., IPM., ASEAN. Eng

Ir. Nini Apriani Rumata, ST., MT

Dekan



Dr. Muh. Syarif S Kuba, S.T., M.T., IPM

NBM. 975 288



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan penulis menyampaikan puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Mariso Kota Makassar”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT.,IPU sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ir. Muhammad Syafaat S. Kuba, ST., M.T sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Ir. Nini Apriani Rumata, ST., MT., IPM sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Ir. Firdaus, ST., M.Si., MT., IPM., ASEAN Eng sebagai Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran, arahan dan motivasi bagi penulis hingga mencapai penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ir. Nini Apriani Rumata, ST., MT., IPM sebagai Pembimbing II yang penuh keikhlasan, ketekunan, serta kesabaran dalam proses bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berdedikasi dan memberikan banyak ilmu, yang bermanfaat dan berharga kepada penulis baik dalam proses perkuliahan maupun aktivitas akademik lainnya. Semoga semuanya bernilai amal jariyah di sisi Allah SWT.
7. Ibu Surharny sutte yang telah banyak berkorban untuk kelancaran kuliah penulis , dan sudah banyak bersabar dalam menghadapi penulis selama menjalani perkuliahan
8. Bapak Kamal Busthanul S.sos yang telah banyak memberikan dedikasi kepada penulis, berkorban untuk kelancaran kuliah penulis, sudah banyak bersabar dalam menghadapi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada saudara Riswandi yang telah membantu dalam dalam pengumpulan data dari data sekunder sampai data primer, walaupun panas dan hujan tetap membantu penulis.

11. Junior yang telah meluangkan waktu nya menemani penulis untuk menyusun skripsi nya, membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan ini masih terdapat banyak penulis menyadari bahwa proses penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Makassar, 23 September 2025

A.Muhammad Taufiq Hidayatullah



Abstrak

Permukiman kumuh di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, merupakan tantangan serius dalam pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kekumuhan dan merumuskan strategi pencegahan serta peningkatan kualitas permukiman berdasarkan pendekatan Analisis Skoring dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Metode Analisis Skoring digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan berdasarkan indikator fisik, sosial, dan lingkungan, sedangkan SPM dijadikan acuan untuk menilai kesesuaian kondisi aktual dengan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kecamatan Mariso berada pada kategori kumuh ringan hingga sedang, dengan permasalahan dominan berupa keterbatasan akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Strategi penanganan yang diusulkan meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penguatan kapasitas masyarakat, serta integrasi program lintas sektor berbasis partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan permukiman layak huni sesuai dengan standar pelayanan minimum

Kata kunci:: permukiman kumuh, peningkatan kualitas permukiman , Kecamatan Maris

Abstract

Slums in Mariso District, Makassar City, pose a serious challenge to sustainable urban development. This study aims to analyze the level of slums and formulate strategies for preventing and improving settlement quality based on the Scoring Analysis and Minimum Service Standards (SPM) approaches. The Scoring Analysis method is used to measure the level of slums based on physical, social, and environmental indicators, while the SPM is used as a reference to assess the suitability of actual conditions with the basic service standards required by the government. The results of the study indicate that most areas in Mariso District are categorized as mild to moderate slums, with dominant problems being limited access to clean water, sanitation, and waste management. The proposed management strategies include improving basic infrastructure, strengthening community capacity, and integrating participatory cross-sector programs. This study recommends the need for synergy between the government, the community, and the private sector to realize livable settlements in accordance with minimum service standards.

Keywords: *slum settlements, improving the quality of settlements, Mariso District*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Definisi dan istilah.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perkotaan.....	15
B. Permukiman	16
C. Kawasan Permukiman	19
D. Permukiman Perkotaan.....	19
E. permukiman kumuh.....	20
F. Kawasan Permukiman kumuh	22
G. Jenis Permukiman Kumuh.....	24
H. Faktor – Faktor Terjadinya Permukiman Kumuh	25
I. Pencegahan permukiman kumuh.....	27
J. Kerangka Pikir	31
K. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Rencana penelitian	40
1. Penelitian Kualitatif	40
B. Lokasi Dan Waktu penelitian	40
1. Lokasi penelitian.....	40
2. Waktu Penelitian.....	43

C. Jenis Data	43
1. Data primer	44
2. Data sekunder	44
D. Instrumen Pengumpulan Data	45
1. Wawancara	45
2. Observasi	46
E. Variabel Penelitian	46
F. Metode Analisis	48
1. Analisis deskriptif	48
2. Analisis pembobotan (skoring)	49
3. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permukiman perumahan rakyat	54
Kerangka Konsep	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran Umum Kota Makassar	56
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	56
2. Kondisi Geografis Kota Makassar	56
3. Demografi Kota Makassar	59
4. Persebaran Kawasan Kumuh Kota Makassar	61
B. Gambaran Umum Kecamatan Mariso	63
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	63
2. Kondisi Geografis Kecamatan Mariso	63
3. Kondisi Topografi dan Iklim Kecamatan Mariso	66
4. Geologi dan Struktur Batuan Kecamatan Mariso	68
5. Kondisi Hidrologi Kecamatan Mariso	70
6. Kondisi Demografi Kecamatan Mariso	72
7. Penyebaran Kawasan Kumuh Kecamatan Mariso	73
8. Kondisi Aspek permukiman Kumuh Kecamatan Mariso	76
9. Analisis Skoring/ Pembobotan	81
10. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM)	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	112
Daftar Pustaka	114

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 PENELITIAN TERDAHULU.....	32
TABEL 3. 1 PELAKSANAAN PENELITIAN.....	43
TABEL 3. 2 VARIABEL PENELITIAN.....	47
TABEL 3. 3 SKOR PERMUKIMAN KUMUH.....	50
TABEL 3. 4 SKOR TINGKAT KEKUMUHAN.....	53
TABEL 4. 1 JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN MARISO	72
TABEL 4. 2 SEBARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.....	73
TABEL 4. 3 SEBARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.....	74
TABEL 4. 4 PENGHASILAN RATA- RATA DI KECAMATAN MARISO.....	80
TABEL 4. 5 ANALISIS SKORING KECAMATAN MARISO	92
TABEL 4. 6 ANALISIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL KECAMATAN MARISO	98

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1 GAMBAR LOKASI	42
GAMBAR 4. 1 PETA ADMINISTRASI KOTA MAKASSAR.....	88
GAMBAR 4. 2 PETA GEOLOGI KOTA MAKASSAR.....	4
GAMBAR 4. 3 PETA DEMOGRAFIS KOTA MAKASSAR.....	60
GAMBAR 4. 4 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN MARISO	64
GAMBAR 4. 5 PETA GEOGRAFIS KECAMATAN MARISO	65
GAMBAR 4. 6 PETA TOPOGRAFI KECAMATAN MARISO	67
GAMBAR 4. 7 PETA GEOLOGI KECAMATAN MAKASSAR.....	69
GAMBAR 4. 8 PETA HIDROLOGI KECAMATAN MARISO	71
GAMBAR 4. 9 PETA KAWASAN KUMUH KECAMATAN MARISO	75
GAMBAR 4. 10 KETERATURAN BANGUNAN DI KECAMATAN MARISO.....	77
GAMBAR 4. 11 BANGUNAN KECAMATAN MARISO	77
GAMBAR 4. 12 KONDISI JALAN LINGKUNGAN KECAMATAN MARISO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
GAMBAR 4. 13 AIR MINUM DAN AIR BERSIH KECAMATAN MARISO	79

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan kota merupakan fungsi waktu yang merupakan proses perubahan keadaan dari satu waktu ke waktu yang lain (Yunus, 2000 dalam Suparno dkk., 2021). Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitasnya berdampak pada kebutuhan lahan untuk permukiman. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan pendanaan dan sistem pembiayaan, serta masyarakat terkoordinasi dan terpadu (Undang undang Nomor 12 tahun 2021) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, berkembang serta melangsungkan hidupnya (Budiharjo, 2009 dalam Suparno dkk., 2021). Pada hakikatnya, permukiman merupakan lingkungan dimana masyarakat mempengaruhi dan memanfaatkan lingkungan tersebut. Permukiman memiliki dua arti yang berbeda, yaitu isi yang menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat lingkungan sekitar, dan wadah yang menunjuk pada fisik hunian terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia. (Magfirah, 2022)

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan

munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus, dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi di bidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. (Magfirah, 2022)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .12 Tahun 2021 Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor. 2821/648/ Tahun 2022 Kota Makassar memiliki jumlah permukiman kumuh yang terbilang cukup besar yaitu 650,74 hektar. Terjadinya urbanisasi yaitu pergeseran lokasi tempat tinggal masyarakat dari pedesaan menuju perkotaan menjadi salah satu yang menyebabkan terciptanya permukiman kumuh. Fenomena tersebut terjadi disebabkan tingginya upah yang diperoleh masyarakat di daerah tujuannya. Kesenjangan upah yang besar antara desa dan kota mendorong penduduk desa untuk datang ke kota. Dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar berdasarkan hasil sensus

penduduk tahun 2020 telah menyentuh angka 1,4 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 1.339.374 jiwa, sehingga penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 0,60 persen. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,26 persen. Dengan luas wilayah 175,77 km² , maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.122 jiwa/Km² (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2022).(Idris, 2023).

Adanya ketimpangan antara masyarakat yang tingkat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah dikarenakan kondisi ketersediaan lahan di Kota Makassar tidak mampu mengimbangi antara persediaan lahan dan juga permintaan. Karena kondisi tersebut maka hanya masyarakat yang mampu dari segi ekonomi yang bisa tinggal di permukiman yang layak. Kondisi tersebut terjadi di beberapa kecamatan di Kota Makassar, salah satunya berada di Kecamatan Mariso. Kecamatan Mariso terdiri dari 9 kelurahan yang dimana hampir seluruh kelurahan termasuk dalam kategori kawasan kumuh, sedang, hingga berat. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar Nomor. 2821/648 Tahun 2022 Penetapan Lokasi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Perumahan Kumuh Kota Makassar Tahun 2022.(Idris, 2023)

Di Kelurahan Mariso yaitu agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, bersih serta sehat. Tujuan dari diadakan upaya tersebut agar terciptanya lingkungan kota yang bersih dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan para pelajar untuk mengakses dan mengenyam Pendidikan mereka di Kelurahan Mariso. Dengan diadakannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah

(stakeholder) maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bersama-sama peduli akan lingkungan sekitar seperti melakukan penghijauan, melakukan sosialisasi antara pemerintah atau lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup kepada masyarakat mengenai lingkungan kota sehat. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan munculnya Kawasan permukiman kumuh di lokasi penelitian, dan apa saja upaya untuk mendapatkan strategi peningkatan kualitas fisik di sekitar sarana Pendidikan pada Kawasan Permukiman Kumuh dalam, Kecamatan Mariso. Kota Makassar. (Idris, 2023).

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Menurut Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2021 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sasaran pembangunan kawasan permukiman mencakup tujuh hal, yaitu : (a) Pengentasan permukiman kumuh di perkotaan, (b) pembuatan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman, (c) terpenuhinya pelayanan air minum, (d) Optimalisasi penyediaan layanan air minum. (e). (Rumata, 2023).

Menurut Mardhanie Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan

sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir. Suatu kawasan permukiman ataupun bukan kawasan permukiman yang dijadikan tempat tinggal, dengan bentuk fisik bangunan yang tidak memenuhi standar atau tidak layak huni, umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota. (Rumata, 2023).

Salah satu penyebab tingginya resistensi dari penghuni permukiman kumuh adalah keinginan untuk tetap berada di lokasi semula berupa jarak dekat antara permukiman dan pusat-pusat lapangan kerja yang digeluti. Menurut Monica, Jamika ciri dari permukiman kumuh adalah: 1) penghuni berasal dari desa yang sama sehingga memungkinkan homogenitas yang agak besar, 2) tingkat Pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar atau putus sekolah, 3) Dalam menyambung hidup mengandalkan otot masing-masing serta memiliki banyak waktu luang, 4) belum terorganisasi menurut badan hukum usaha yang lazim berlaku, 5) bekerja pada sektor informal, 6) kompleks permukiman padat dan letak permukiman tidak teratur, 7) fasilitas elementer, 8) Bangunan tempat bermukim serba sederhana terbuat dari bahan serupa, 9) penghuni memiliki semangat kekeluargaan, 10) kesadaran hidup beragama. Struktur ekonomi masyarakat yang tinggal di Permukiman Kumuh Sebagian

besar merupakan masyarakat menengah kebawah dengan tingkat pendapatan rendah (Rumata, 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi dan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di kecamatan mariso kota makassar?
2. Bagaimana arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kecamatan mariso kota makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi dan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar
2. Menganalisis arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kecamatan mariso kota makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat megembangkan kemampuan serta memperkuat teori mengenai topik kualitas kawasan permukiman kumuh di kota Makassar

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan referensi dasar untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah kota makassar terkait peningkatan kawasan permukiman kumuh dan pencegahan kawasan permukiman kumuh kota makassar yang dapat dilakukan guna mengatasi kawasan permukiman kumuh di kecamatan Mariso Kota Makassar.

3. Manfaat pemerintah

Sebagai salah cara untuk pencegahan kawasan permukiman kumuh yang ada di kecamatan mariso kota makassar, penyesuaian kebijakan kawasan permukiman kumuh, yang berlandaskan dengan RP2KPKP Kota Makassar.

E. Ruang Lingkup

1. Lingkup wilayah

Mariso adalah sebuah kecamatan yang ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan, wilayah kecamatan mariso pada awalnya merupakan sebuah kampung di wilayah kerajaan Tallo yang berubah menjadi distrik pada pemerintahan Hindia Belanda lalu menjadi kecamatan pada masa pemerintahan Indonesia. Kecamatan mariso terletak di kawasan pesisir kota Makassar wilayahnya telah terbagi menjadi 9 kelurahan. Kecamatan mariso merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kota Makassar.

Kecamatan Mariso terletak di bagian barat kota Makassar, wilayah kecamatan mariso menjadi salah satu dari tujuh kecamatan di kota Makassar yang wilayahnya berbatasan dengan pantai. Luas wilayah kecamatan mariso adalah 2,88 Ha, persentase luas wilayah kecamatan mariso terhadap luas kota Makassar adalah 1,04%.

Kecamatan Mariso memiliki 9 kelurahan yaitu : Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang. ini lah kelurahan yang ada di kecamatan Mariso Kota Makassar. Kecamatan mariso memiliki titik koordinat yaitu 5°09'33.00" LS 119°24'32.10" BT, dan berbatasan dengan batas-batas

wilayah administrasi dari letak kecamatan mariso antara lain : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung pandang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate, sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar.

2. Lingkup substansi

Lingkup substansi dalam menilai kondisi karakteristik dan tingkat kekumuhan berdasarkan indikator

1. Keteraturan bangunan
2. Kondisi fisik bangunan
3. Jalan lingkungan
4. Penyediaan air bersih dan air minum
5. Pengelolaan sampah
6. Kepadatan penduduk
7. Penghasilan rata – rata

F. Definisi dan istilah

Kawasan kumuh atau tepatnya Permukiman Kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh di hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan kumuh,

khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Sesuai dengan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

1. Keteraturan bangunan

Keteraturan bangunan terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b) mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c) mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Kondisi bangunan

Bangunan, gedung, atau gedong adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.^[1] Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan

memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

3. Jalan lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan di desain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

4. Penyediaan air bersih dan air minum

Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.

Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air bersih, Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.

Menurut Permendagri Nomor . 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah

Air Minum, Departemen dalam Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

5. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

6. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah per satuan luas atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk atau population density dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.

7. Penghasilan rata – rata

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bahas secara umum apa yang dimaksud dengan penghasilan. Secara luas, penghasilan diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh individu, baik itu dari sumber-sumber yang bersifat

tetap, misalnya gaji, upah, atau dividen, maupun sumber-sumber yang bersifat tidak tetap, misalnya bonus atau hasil penjualan.

Secara singkat, penghasilan dapat disimpulkan sebagai jumlah total uang yang diperoleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dari semua sumber pendapatan yang dimilikinya.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup, penghasilan memainkan peran yang sangat penting. Penghasilan mempengaruhi kualitas hidup, status sosial, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Namun, penghasilan juga memiliki kekurangan dan dapat memengaruhi keseimbangan hidup dan kesehatan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami peran penghasilan dalam kehidupan dan melakukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghasilan dan kehidupan pribadi.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya meningkatkan penghasilan, baik itu melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kerja, berinvestasi, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup.

G. Sistematika Pembahasan

penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan yang secara garis besar terdiri atas beberapa bab dan terbagi dalam beberapa sub bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi dan istilah, dan sistematik penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang literatur yang digunakan oleh penulis sesuai dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai literatur terkait kualitas kawasan kumuh, kerangka pikir, hipotesis beserta definisi operasional

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rencana penelitian, lokasi yang akan diteliti, dan waktu penelitian, populasi dan teknik sampel, instrumen pengumpulan data, serta analisis data yang akan digunakan pada penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian kota makassar, gambaran umum kecamatan Mariso dan sebaran kawasan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Mariso, bagaimana bentuk peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh di lokasi penelitian di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait analisis pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Mariso, Kota Makassar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan suatu wilayah yang terdapat kawasan permukiman, perkantoran serta digunakan sebagai pemusatan segala aktivitas atau kegiatan baik pelayanan dan jasa, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, maupun pusat kegiatan pemerintahan. Wilayah kota merupakan pusat dari jasa distribusi atau disebut sebagai growth centre (Adisasmita, 1989). Berdasarkan pernyataan tersebut kota akan mengalami pertumbuhan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Pada kawasan perkotaan, kegiatan pertanian bukanlah menjadi kegiatan utamanya. Banyaknya aktivitas yang dilakukan di kawasan perkotaan mengakibatkan intensitas penggunaan lahannya cukup tinggi. Seiring berjalannya waktu kawasan perkotaan akan terus berkembang dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat. Sehingga secara perlahan kawasan perkotaan akan selalu mengalami perubahan baik dalam kondisi fisik lingkungan maupun kondisi sosialnya. Perkembangan kawasan perkotaan apabila tidak diarahkan dan direncanakan sedini mungkin, maka akan menyebabkan berbagai permasalahan pada lingkungan tersebut.

Selain pengertian kota (city), dikenal pula perkotaan (urban) yang pengertiannya lebih luas menunjukkan ciri/karakteristik/sifat kekotaan. Dalam hal ini perkotaan atau kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang

berupa daerah pinggiran sekitarnya/kawasan suburban. di Mengacu pengertian di atas, Kawasan Perkotaan boleh jadi merupakan aglomerasi kota (otonom) dengan kota-kota fungsional di wilayah sekitarnya yang memiliki sifat kekotaan, dapat melebihi batas wilayah administrasi dari kota yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah kawasan perkotaan metropolitan Bandung mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, serta kawasan sekitarnya yang mempunyai ciri/karakteristik perkotaan yang sebenarnya termasuk dalam batas administrasi Kabupaten Bandung. Demikian pula kawasan perkotaan Jabodetabek yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok.

B. Permukiman

Permukiman disebutkan sebagai segala bentuk tempat tinggal manusia dari rumah terkecil hingga kota terbesar, dengan berbagai bentuk, bersifat permanen maupun sementara di pedesaan dan perkotaan, maupun yang tersebar dan diaglomerasi dalam mengejar tujuan hidup (Živkovi, 2019). Habraken (1983) mendefinisikan “place” sebagai tempat penghuni tinggal yang mana wujud lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Trancik (1986) juga mengatakan sebuah tempat (place) memiliki karakteristiknya tersendiri seperti yang disampaikan Doxiadis (1968) bahwa terdapat dua elemen dalam pembentukan permukiman yaitu adanya wadah (container) dan isi (content).

Heat (2021) dan BBC (2021) menyebutkan bahwa permukiman merupakan tempat tinggal orang pada sebuah pemukiman terkecil yaitu satu rumah di daerah terpencil atau yang besar berada di kota besar (kota dengan lebih

dari 10 juta penduduk). Selain itu terdapat juga situs sebagai lokasi pemukiman di bumi yang memiliki karakteristik fisik lanskap. Terdapat dua pembagian wilayah dalam istilah geografi, yaitu area urban (perkotaan) dan area rural (pedesaan).

Area urban merupakan area terbangun di wilayah kota mana pun dengan populasi 10.000 orang atau lebih. Sedangkan di sisi lain disebut area rural yang berarti di luar daerah perkotaan yang terdapat lahan pertanian, hutan, gurun atau sabana tergantung keberadaannya. Menyimpulkan pendapat dari Sutardjo Kartohadikusumo dan Bintarto, suatu Desa adalah kesatuan hukum masyarakat tinggal yang mengadakan pemerintahan sendiri sebagai perwujudan wilayah yang muncul akibat unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, dan kultural serta hubungan timbal baliknya dengan daerah disekitarnya (Nailufar, 2020). Lebih lanjut pemukiman pedesaan diartikan sebagai tempat bermukim orang yang terlibat dalam kegiatan utama seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, atau perikanan. Dalam permukiman pedesaan terdapat kumpulan rumah-rumah yang terbentuk tidak direncanakan namun memiliki ikatan sosial yang kuat, sehingga tercipta morfologi fisik dan morfologi sosial.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992). Pada dasarnya setiap keluarga harus memiliki rumah sebagai tempat tinggalnya, karena tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan

mendasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Rumah bukan saja sebuah tempat untuk berteduh dari panas maupun hujan, namun juga sebuah tempat untuk membentuk karakter penghuninya sehingga dibutuhkan kondisi rumah yang layak (Putra & Andriana, 2017). Di Indonesia saat ini mulai dikembangkan kawasan perumahan baik pada kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Tujuan dilakukannya pengembangan pada kawasan perumahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan mendasar guna mencapai pemerataan kesejahteraan. Saat ini perumahan sudah mulai sulit didapatkan dikarenakan banyaknya pengembangan apartemen-apartemen atau rumah hunian dengan kelas atas. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat di perkotaan bisa mendapatkannya. Akan tetapi karena faktor kebutuhan semua orang membutuhkan adanya tempat tinggal. Sehingga membuat masyarakat yang berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan membuat tempat tinggal seadanya berdasarkan kemampuan ekonominya untuk bertahan hidup. Permukiman adalah suatu kawasan perumahan secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik ruang yang lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan (Ridlo, 2020).

Masalah terkait perumahan dan permukiman merupakan masalah yang tidak akan ada habisnya karena dapat disimpulkan bahwa perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan yang berada pada satu ruang lingkup dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang

dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

C. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

D. Permukiman Perkotaan

Secara umum permukiman di perkotaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu permukiman yang layak huni dan permukiman yang tidak layak huni. Mereka yang tinggal di permukiman layak huni biasanya adalah mereka yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas, sedangkan mereka yang menempati permukiman yang tidak layak huni adalah mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah atau dikenal dengan menempati wilayah permukiman kumuh. Umumnya di Negara berkembang di wilayah kotaannya banyak terdapat permukiman kumuh. Di wilayah

perkotaan, permukiman kumuh dapat berada dekat dengan wilayah pusat kota ataupun ada juga yang berada jauh dari pusat kota.

Adanya permukiman kumuh di perkotaan harus disadari oleh semua pihak dan jika sudah terbentuk permukiman kumuh tersebut maka akan sulit dihindari (Hariyanto, 2010). Kepadatan bangunan dapat terjadi karena banyaknya terjadi pembangunan permukiman dan ini akan terus terjadi secara berkelanjutan (Rindarjono, 2012). Fasilitas umum yang tidak memadai, bangunan rumah yang padat dan tidak layak huni adalah ciri dari permukiman kumuh (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 tahun 2016). Wilayah tersebut merupakan wilayah yang rentan akan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kerentanan yang terjadi seperti kerentanan ekonomi.(Wahyu Saputra, 2022)

E. permukiman kumuh

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa

permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997).

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya.

Ciri – ciri permukiman kumuh seperti yang diungkapkan oleh (parsudi suparlan : 1984) adalah

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang - ruang yang ada di permukiman kumuh

sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya

4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan- satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas – batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:

- a) Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
- b) Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari RT atau RW.
- c) Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.

5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh yang dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda- beda tersebut
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informall. (Jurnal Arsitektur, t.t.)

F. Kawasan Permukiman kumuh

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang mengalami penurunan kualitas permukiman dalam berbagai aspek, baik dari segi kualitas lingkungan secara fisik, sosial ekonomi, budaya, dan sebagian

besar dihuni oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang timbul di kawasan perkotaan yang disebabkan tidak mengikuti alur pertumbuhan ekonomi yang terjadi sehingga menyebabkan kemiskinan, apabila hal ini tidak segera diatasi maka akan memberikan dampak pada lingkungan secara fisik maupun sosial pada kawasan tersebut (Putra & Andriana, 2017). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa “Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh merupakan perumahan yang mengalami degradasi kualitas fungsi dari suatu tempat hunian”.

Masalah perumahan dan permukiman selalu dikaitkan dengan proses pembangunan, serta banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan dampak dari keterbelakangan pembangunan (Hariyanto, 2007). Pembangunan tempat tinggal harus dilakukan secara terpadu, terarah, terencana, dan harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana utama. Apabila tidak dilakukan sesuai hal-hal tersebut maka akan cenderung lebih cepat mengalami degradasi lingkungan, dan seiring berjalannya waktu akan berkembang menjadi kawasan kumuh akibat penurunan kualitas lingkungan. Sehingga dapat menimbulkan ancaman buruk, baik bagi masyarakat yang tinggal di sana maupun bagi lingkungan itu sendiri. Jika kepadatan penduduk dalam suatu kawasan tidak terkontrol dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sehingga

dapat menimbulkan masalah dalam kependudukan seperti kemiskinan, lapangan pekerjaan, lahan untuk tempat tinggal, bahkan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang nantinya akan menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan permukiman kumuh. Keberadaan permukiman kumuh di perkotaan tidak dapat dihindari dan harus diakui adanya (Hariyanto, 2007). Karena permukiman kumuh telah menjadi bagian dari struktur ruang kota. Guna meminimalisir perkembangan kawasan permukiman kumuh maka diperlukan upaya untuk menghambat faktor-faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh.

G. Jenis Permukiman Kumuh

Kawasan quarter yaitu merupakan suatu sekumpulan lahan yang dihuni oleh permukiman – permukiman liar, dimana kondisi bangunan ada yang baik dan buruk tetapi permasalahannya terdapat pada status lahan yang ilegal. (Utomo Is Hadri, 2000). Daerah squatter jika diartikan dalam kamus sosiologi adalah kondisi dimana seseorang dikatakan ilegal dalam bertempat tinggal pada suatu tempat (Sukanto Soerjono, 1985). Sedangkan dalam kamus ilmu-ilmu sosial daerah squatter diartikan sebagai seseorang yang menempati tanah-tanah tanpa ijin resmi (Leading Hugo F, 1986). Wilayah squatter adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat dimana pada umumnya jenis bangunan semi permanen dan dibangun di lahan yang ilegal karena merupakan lahan yang tidak jelas status kepemilikan lahan, sebagian besar adalah lahan negara sebagai kawasan lindung.

Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai permukiman kumuh memiliki beberapa karakteristik dari berbagai sektor seperti:

- 1) Permukiman padat penduduk dimana umumnya berada di perkotaan karena diakibatkan urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota
- 2) Tingkat mata pencaharian yang tidak tetap mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah.
- 3) Kondisi bangunan semi permanen karena ketidakmampuan untuk membeli bahan bangunan yang kokoh.

Kondisi kebersihan dan sanitasi rendah

- 1) Pelayanan sarana prasarana lingkungan tidak memadai Kondisi persil antara satu bangunan dengan bangunan lainnya tidak tertata dengan baik, tergolong semrawut.
- 2) Umumnya dihuni oleh kondisi sosial ekonomi menengah kebawah
- 3) Status kepemilikan tanah yang tidak jelas dimana sebagian besar adalah tanah milik negara (Utami Trisni 1997).

H. Faktor – Faktor Terjadinya Permukiman Kumuh

Pertama Penyebab hadirnya permukiman kumuh perkotaan yang pertama adalah karena keluarga mereka sejak lama tinggal di lokasi tersebut, sehingga keturunan mereka pun tinggal di lokasi tersebut. Kondisi kekeluargaan yang ada di permukiman kumuh tergolong pada hubungan yang erat (Ridlo, 2001). Kedua, ekonomi masyarakat yang tidak mampu membeli atau menyewa rumah yang layak huni dengan harga tinggi, sehingga mereka membeli atau menyewa rumah di permukiman kumuh. Selain itu kondisi bangunan, drainase, dan air menyebabkan munculnya permukiman kumuh. Kualitas material bangunan yang rendah dan umur bangunan yang sudah lama atau tua akan menurunkan kualitas bangunan

sehingga hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kekumuhan di permukiman kumuh. mengakibatkan banyaknya bermunculan berbagai penyakit yang dapat menyerang masyarakat dan akibat buruknya penyakit tersebut dapat mengakibatkan kematian. Tempat pembuangan sampah yang tidak terpelihara dan banyak penduduk yang tidak memiliki tong sampah mengakibatkan banyaknya timbulan sampah yang ada di permukiman kumuh.

Kedua adalah dampak sosial, adapun dampak sosial yang dapat hadir di permukiman kumuh yaitu pertama kemiskinan, hal ini dapat terjadi karena kemampuan atau skill tidak dimiliki masyarakat sehingga mereka berada pada garis kemiskinan. Selain itu adalah rendahnya pendidikan, dapat diartikan bahwa ekonomi yang rendah mengakibatkan banyak penduduk yang tidak bersekolah. Pendidikan penduduk di permukiman kumuh didominasi mereka yang memiliki pendidikan rendah, hal itu berdampak pada pola pikir mereka yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan, selain itu juga pendidikan yang rendah tersebut dapat mempengaruhi jenis pekerjaan dan pendapatan penduduk di permukiman kumuh (Wimardana dan Setiawan, 2016). Kondisi pekerjaan penduduk di permukiman kumuh didominasi mereka yang bekerja pada sektor informal seperti buruh, hal tersebut terjadi karena pendidikan dan skill yang mereka miliki rendah.

banyaknya terjadi kriminalitas, hal ini karena ekonomi yang rendah juga mengakibatkan masyarakat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba, kenakalan

remaja, premanisme adalah bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di permukiman kumuh, banyaknya imigran yang ingin mengadu nasib di perkotaan agar mendapatkan ekonomi yang lebih baik, namun dikarenakan skill yang rendah akhirnya mereka pun menempati wilayah permukiman kumuh. Kondisi ekonomi yang rendah dengan status migran adalah mereka yang tinggal di permukiman kumuh (Saputra, 2022)

I. Pencegahan permukiman kumuh

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan pengendalian
- b. Pemberdayaan masyarakat
 1. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan atas sesuaian terhadap:
 - a. Perizinan
 - b. Standar teknis
 - c. Kelayakan fungsi
 2. Kesucian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan perumahan dan permukiman
 3. Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

barusebagai dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. Pemantauan
- b. Evaluasi
- c. Pelaporan

1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

- a. Langsung
- b. Tidak langsung

2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat

3. Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.

4. Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan :

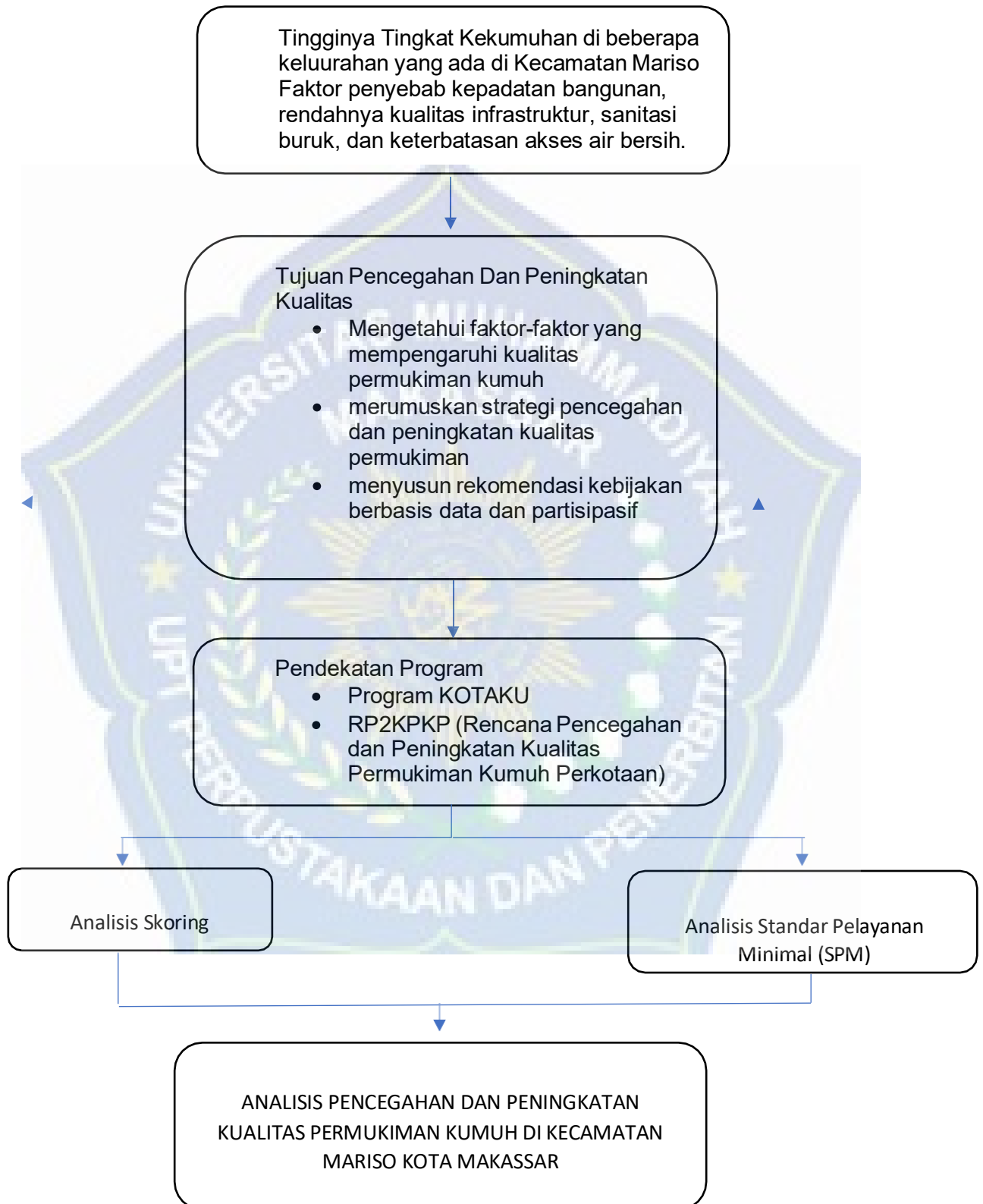
- a. Data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman
- b. Pengaduan masyarakat maupun media massa.

5. Pemantauan terhadap tumbuh dan berkebangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

1. Evaluasi untuk pencegahan tumbuhan dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman kumuh terhadap:
 - a. Perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan.
 - b. Kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.



J. Kerangka Pikir



K. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
1.	Mimi Arifin, A.Yudhoyono, S.Trisutomo,	Penyuluhan dan Pendampingan Penataan Lingkungan Pada Permukiman Kumuh di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar	Mengidentifikasi karakteristik prasarana permukiman masyarakat dan preferensi masyarakat terhadap kondisi permukiman tepi kanal Jongaya di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar.	Metode yang digunakan yaitu focus group discussion (FGD)	Untuk menambah penghasilan masyarakat yang ada di sekitaran jalan bontomarannu Kec. Mariso	Perbedaan antara penelitian, peneliti ini berfokus di bidang tata pengelolaan kanal yang ada di bontomarannu kec Mariso
2.	Amelia Maghfirah, Syafri Rusneni Ruslan	Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab kumuh dan menentukan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto	analisis Analytical Hierarchy Process	Penelitian ini bertujuan untuk pencegahan kawasan permukiman kumuh yang ada di kawasan Biringjene, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto	Perbedaan penelitian ini yaitu cuma beda lokasi yang akan diteliti sang peneliti

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
3.	Nining Triastuti Joko Pramono Aris Tri Haryanto	Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 Di Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun	untuk menentukan efektivitas pelaksanaan program Kotaku dalam mengatasi kawasan kumuh di Desa Klitik.	metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Untuk melaksanakan program kota tanpa kumuh yang ada di desa KLITIK Kec wonoasri Kabupaten Madiun	Perbedaan penelitian ini adalah untuk melaksanakan program kotaku,
4.	Agistya Risna Sari Mohammad Agung Ridlo	Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh, khususnya pada kawasan perkotaan.	metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis dalam menyelesaikan permasalahan.	Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	Perbedaan ini yaitu penelitian ini mencari penyebab nya terjadinya kawasan permukiman kumuh yang ada di perkotaan.

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
5.	Donny Wahyu Wijaya	Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang)	bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh, menentukan kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh.	Metode yang digunakan yaitu penggunaan analisis SWOT untuk peningkatan kualitas infrastruktur.	Kesimpulan untuk perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di kota Malang.	Perbedaan yaitu perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Malang.
6.	Wahyu Saputra Sukmaniar Muhammad Hafiz Hermansyah	Permukiman Kumuh Perkotaan Penyebab, Dampak Dan Solusi	Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadi permukiman kumuh dan dampaknya serta solusi yang dapat dilakukan untuk wilayah permukiman tersebut.	Metode yang digunakan adalah studi pustaka, adapun pustaka yang diambil adalah jurnal-jurnal ataupun buku-buku yang berkaitan dengan permukiman kumuh.	Kesimpulan yaitu penelitian ini melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, akademis, komunitas	Perbedaan ini yaitu untuk mencari solusi, dampak, penyebab terjadinya kawasan permukiman kumuh.

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
7.	Batara Surya Despry Nur Annisa Ahmad Emil Salim Rasyidi	Keberlanjutan Penanganan Permukiman Kumuh Berkas Komunitas Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Menganalisis urbanisasi berlebih dan pemadatan maksimal bekerja sebagai determinan perkembangan permukiman kumuh di Kota Makassar	Metode penelitian yang digunakan adalah desain sequential explanatory, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan.	merekomendasikan pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan Kota Makassar ke arah penanganan permukiman kumuh.	Perbedaan ini yaitu untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan kota makassar ke arah penanganan permukiman kumuh.
8.	Gun Faisal Ikaputra	Tipologi Permukiman Di Indonesia Penjenjangan, Dikotomi, Konteks, Sosial, Dan Spesial	tujuan penelitian beserta tipe evidence; dilanjutkan dengan pencarian literatur berdasarkan kategori yang ditetapkan; Selanjutnya penilaian studi; dan mengelompokkan temuan tersebut; dan diakhiri dengan menentukan dan menyimpulkan temuan sebagai konteks atau hasil ulasan.	metodologi penelitian, dengan mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian yang berfokus pada hirarki permukiman	kumpulan dari kampungan atau persukuan tadi membentuk hierarki yang lebih tinggi; Sedangkan Tipe berikutnya di atas kampungan jenjang tersebut mulai samar, karena tidak banyak daerah yang memiliki hierarki yang di atas kampungan.	Perbedaan ini yaitu tentang menentukan tipe permukiman, dan ada beberapa tipe yaitu, tipe 1 kelompok pertanian, tipe 2 kelompok bermain, tipe 3 kumpulan kelompok permukiman.

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
9.	Ahmad Rijal Lutfian Wijanarko Andarita Rolalisas Ibrahim Tohar	Tipologi Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan Indonesia Berdasarkan Penangan	Area permukiman atau kawasan kumuh adalah wajah dari kemiskinan, karena biasanya pada permukiman atau kawasan kumuh, masyarakatnya miskin atau memiliki pendapatan rendah dan banyak sekali kita jumpai di kawasan permukiman perkotaan.	Pada studi ini, penulis ingin mengklasifikasikan beberapa tipologi kawasan lingkungan permukiman kumuh menurut PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2018.	pada karya tulis ini, penulis ingin menggunakan metode literatur review. Literature review adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian.	Perbedaan ini yaitu penulis akan mengklasifikasikan beberapa tipologi kawasan lingkungan permukiman kumuh.
10.	Risnawati K	Analisis Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Soppeng	Bertujuan untuk Merumuskan konsep pencegahan kualitas perumahan kumuh sesuai data yang diperoleh yaitu mengklasifikasikan dan menyajikan data	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten.	Mempertimbangkan kondisi fisik yang ada di lokasi penelitian guna mengantisipasi dampak Perkembangan Permukiman Kumuh	Perbedaan nya yaitu bedanya lokasi yang akan saya teliti dengan peneliti terdahulu

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
11	Bambang Pujiyono Arfian Rudi Subiyakto	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor	penelitian ini adalah pada ruang lingkup isi kebijakan dan implementasi kebijakan.	Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memberikan daya analisis terhadap data atau fenomena yang masih dalam lingkup fokus penelitian.	analisis, peningkatan kualitas, kawasan kumuh, kabupaten bogor	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian
12	Muhammad Rosmansyah Asmah Suska	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Pulau Kambing Kelurahan Sei.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Implementasi, Pengawasan dan Pengendalian, permukiman kumuh	Perbedaan penelitian ini lokasi penelitian

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
13	Ibrahim Jabir Baharuddin Rudi Latief Muhammad Idris Taking	Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kekumuhan dan merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.	menggunakan alat analisis skoring baseline sedangkan untuk merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu menggunakan desain teknis dalam bentuk tiga dimensi (3D).	Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu,	Perbedaan penelitian ini Cuma di lokasi penelitian
14	Gabriel Dave Ponto Sofia E. Pangemanan Ventje Kasenda	Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Kombos Timur)	Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kombos Timur dengan menggunakan konsep Fred R.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Strategi, Penanganan, Permukiman Kumuh	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian

NO	Nama Peneliti / Nama Jurnal	Judul Penelitian	Tujuan Peneliti	Metode Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan penelitian
15	Nini Apriani Rumata Nurul Ilma Nur Miftahul Janna Lismayanti Nurdin	Kajian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kawasan Bontorannu Kota Makassar	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di kawasan Bontorannu. Kawasan Permukiman Bontorannu dibagi menjadi 2 zona yaitu Zona A Kelurahan Bontorannu dan Zona B Kelurahan Mattoangin.	Metode yang digunakan adalah metode analisis skoring dan analisis deskriptif.	Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa metode analisis dalam mengidentifikasi tingkat kekumuhan permukiman serta sebagai acuan dalam program penanganan kawasan kumuh di Kawasan Permukiman Bontorannu.	Perbedaan penelitian ini adalah kajian tingkat kekumuhan kawasan permukiman

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rencana penelitian

Pada penelitian ini melakukan studi kasus terkait peningkatan Analisis pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

1. Penelitian Kualitatif

Menurut (Sugiyono, 2015) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan interpretasi data pada lapangan dengan karakteristik fleksibel dan berkembang selama proses penelitian yang bertujuan menggambarkan realitas kompleks. Cakupan yang akan diteliti pada jenis penelitian ini meliputi kondisi fisik infrastruktur terkait tentang kawasan permukiman kumuh kecamatan mariso, dan beberapa yang ada di lokasi penelitian

B. Lokasi Dan Waktu penelitian

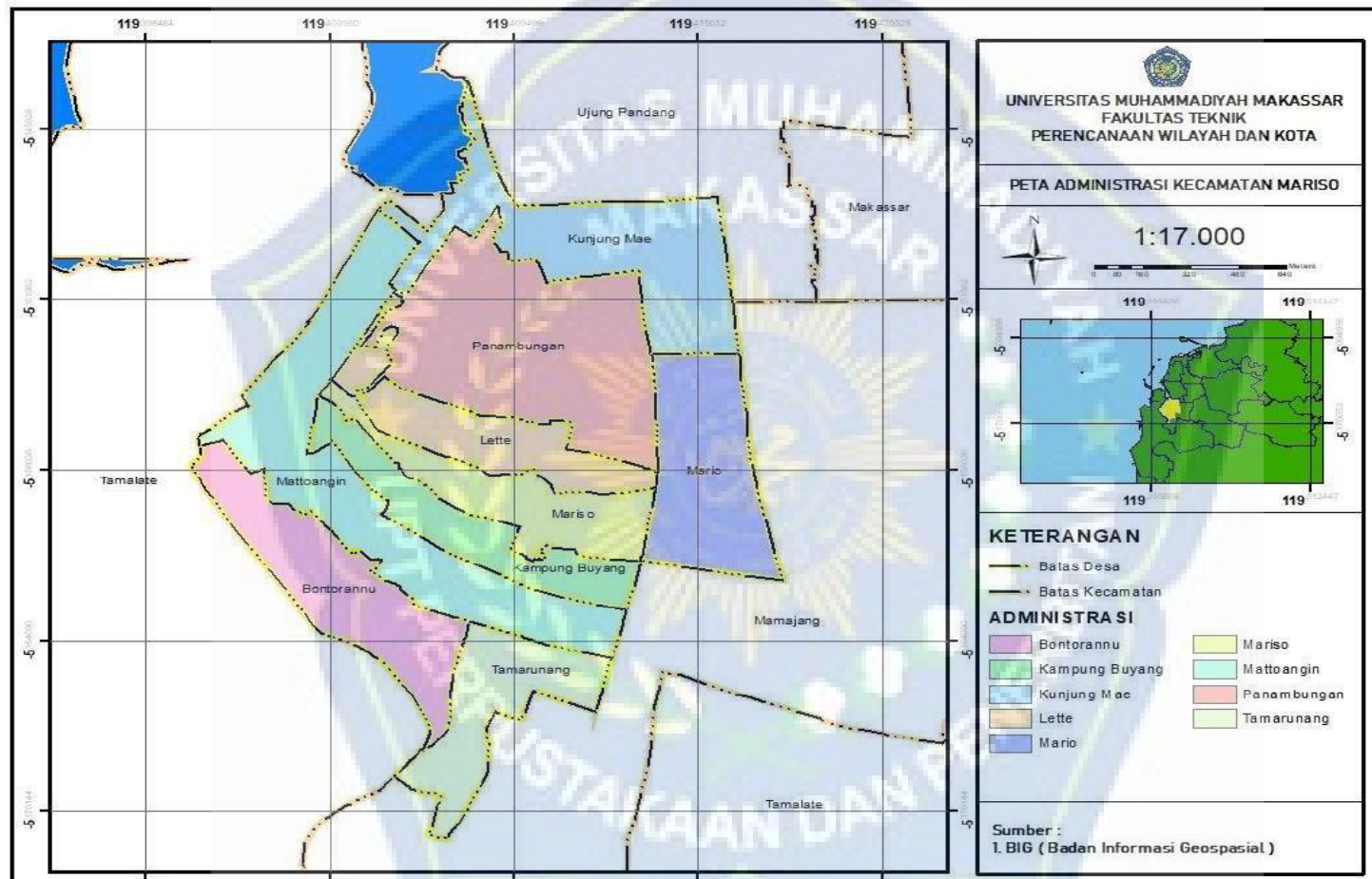
1. Lokasi penelitian

lokasi penelitian ini berlokasi di kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar, Mariso adalah sebuah kecamatan yang ada di kota Makassar sulawesi selatan, wilayah kecamatan mariso pada awalnya merupakan sebuah kampung di wilayah kerajaan Tallo yang berubah menjadi distrik pada pemerintahan Hindia belanda lalu menjadi kecamatan pada masa pemerintahan indonesia. Kecamatan mariso

terletak di kawasan pesisir kota Makassar wilayahnya telah terbagi menjadi 9 kelurahan. Kecamatan mariso merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kota Makassar.

Kecamatan Mariso terletak di bagian barat kota Makassar, wilayah kecamatan mariso menjadi salah satu dari tujuh kecamatan di kota Makassar yang wilayahnya berbatasan dengan pantai. Luas wilayah kecamatan mariso adalah 2,88 Ha, persentase luas wilayah kecamatan mariso terhadap luas kota Makassar adalah 1,04%.

Kecamatan Mariso memiliki 9 kelurahan yaitu: Bontomarannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang. ini lah kelurahan yang ada di kecamatan Mariso Kota Makassar. Kecamatan mariso memiliki titik koordinat yaitu 5°09'33.00" LS 119°24'32.10" BT, dan berbatasan dengan batas-batas wilayah administrasi dari letak kecamatan mariso, antara lain : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung pandang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate, sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Pada tahun 2019, Kecamatan Mariso menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Makassar. Jumlah penduduknya sebanyak 33.038 jiwa.



Gamabar 3. 1 Lokasi Penelitian

2. Waktu Penelitian

Waktu pada penelitian ini merupakan batas waktu yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun waktu yang diperlukan melakukan penelitian untuk menyelesaikan rumusan masalah pada kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar yakni akan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Tabel 3. 1 Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Seminar proposal								
2.	Penelitian (survey dan pengambilan data)								
3.	Kompilasi data								
4.	Analisis data								
5.	Penyusunan skripsi								
6.	Seminar hasil skripsi								
7.	Seminar tutup skripsi								
8.	Yudisium								

C. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder untuk mendapatkan informasi serta sebagai kebutuhan analisis.

1. Data primer

merupakan data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui instrumen pengumpulan data survey atau observasi. Data primer yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan pengamatan langsung terkait infrastruktur kawasan permukiman kumuh Kecamatan Mariso Kota Makassar.

2. Data sekunder

merupakan data yang dikumpulkan bersumber dari pihak lain berupa data pemerintah, jurnal ilmiah, buku atau statistik. Ada beberapa indikator yang ada di kawasan permukiman kumuh yaitu, Kondisi bangunan, Keteraturan Bangunan, Kondisi Jalan Lingkungan, Penyediaan air bersih, pengolahan Air Limbah, pengelolaan Sampah, Proyeksi Kebakaran, dan Penyediaan RTH, Pada penelitian ini juga ada beberapa jenis data yang diambil di instansi pemerintah yang dibutuhkan yaitu:

- a. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2821/648/Tahun 2023 tentang kawasan permukiman kumuh
- b. Profil dan peta kawasan permukiman kumuh kota makassar
- c. Data shp kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar
- d. Data sebaran kawasan permukiman kumuh setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Mariso Kota Makassar
- e. Dokumen RP2KPKP Kota Makassar
- f. Dokumen PR3KP
- g. Data kepemilikan tanah (ATR/BPN)
- h. Data Penghasilan Masyarakat kota Makassar Tahun Terba

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dipengaruhi oleh dua hal yaitu kualitas data hasil penelitian meliputi kualitas pengumpulan data dan kualitas instrumen penelitian. Oleh sebab itu instrumen dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang teruji belum tentu dapat mewujudkan data yang reliabel dan valid, apabila memiliki instrumen yang tidak digunakan secara tepat melalui pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan secara sekunder untuk data tidak langsung yaitu dengan mencari data terkait penelitian di instansi-instansi dengan kegiatan kawasan permukiman kumuh yaitu Dinas Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagian lainnya. sementara itu untuk data langsung atau data primer dilakukan dengan pengumpulan data langsung dengan meninjau lokasi penelitian. Adapun pengumpulan data yang dapat dilakukan berdasarkan tekniknya sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan apabila peneliti perlu melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan kondisi permasalahan terkait penelitian atau juga penelitian dapat mengetahui permasalahan atau topik yang lebih mendalam terhadap responden dengan jumlah responden yang sedikit. Wawancara juga terbagi menjadi dua yaitu, wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan pengumpulan data dimana instrumen penelitian telah diketahui dan disiapkan dengan menggunakan pedoman yang telah ditentukan. Sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur, peneliti bebas dalam menggali informasi tanpa menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi memiliki karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain. observasi dilakukan melalui proses pengamatan dan ingatan selama ada di lokasi yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah konsep, atribut atau karakteristik yang dapat diukur, diobservasi atau manipulasi dalam sebuah penelitian. Pada sub bagian ini dijelaskan juga skala variabel yang telah disesuaikan dengan teknik analisis dapat dilihat pada Tabel 3.2 Variabel penelitian berikut.



Tabel 3. 2 Variabel Penelitian

NO	Tujuan	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Metode Analisis	Teknik Analisis
1.	Mengetahui kondisi dan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar	Mengetahui kondisi kawasan permukiman kumuh merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk menentukan kondisi kawasan kumuh	- kepadatan penduduk dan bangunan - jalan lingkungan - persampahan - drainase - Air Bersih - Proteksi kebakaran - pengelolaan air limbah - kurangnya RTH	kepadatan penduduk dan bangunan yaitu yang bangunan nya tidak layak untuk dihuni	Pembobotan Deskriptif Kualitatif Kuantitatif	Analisis tingkat keberlanjutan
2..	Menganalisis arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di kecamatan mariso kota makassar	Menganalisis arahan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh adalah salah supaya bisa diketahui apakah kawasan permukiman kumuh termasuk kumuh tinggi, kumuh sedang, kumuh rendah, dan bisa di ambil salah satu indikator apakah itu pemugaran,	- kepadatan penduduk dan bangunan - jalan lingkungan - persampahan - drainase - Air Bersih - Proteksi kebakaran - pengelolaan air limbah - kurangnya RTH	Ada tiga indikator yang ada di buat untuk pencegahan kawasan kumuh yaitu; - Pemugaran - Peremajaan - Permukiman kembali	Pembobotan Deskriptif Kualitatif Kuantitatif	Analisis pembobotan Analisis Skoring

F. Metode Analisis

Analisis data adalah tahapan selanjutnya apabila pengumpulan data telah dilakukan dari seluruh responden atau sumber data sekunder maupun primer. Analisis data mencakup pengelompokan data menurut jenis responden dan variabelnya, melakukan perhitungan untuk menyelesaikan rumusan masalah, menampilkan data pada variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan yang berkaitan dengan hipotesis yang diajukan. Adapun analisis data yang relevan dalam penelitian ini dapat mencakup beberapa pendekatan. Berikut ini adalah beberapa analisis data yang dapat dilakukan

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau objek secara detail dan terperinci. Metode ini bertujuan untuk pengumpulan data tersebut, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskriptif yang jelas dan terperinci. Dalam analisis deskriptif, peneliti tidak mencoba untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti, melainkan lebih fokus pada bagian variabel-variabel tersebut berhubungan satu sama lain.

Dalam analisis deskriptif, peneliti biasanya menggunakan data primer maupun data sekunder, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data dari lembaga pemerintah, data statistik, atau data dari peneliti sebelumnya.

Ada beberapa indikator yang ada dilakukan saat meneliti

- b. Kondisi rumah
- c. Wawancara bersama masyarakat
- d. Penghasilan masyarakat yang ada di kawasan permukiman kumuh
- e. Kondisi air bersih
- f. Kondisi persampahan
- g. Kondisi air limbah
- h. Kondisi penduduk
- i. Sebaran RTH yang ada di kawasan permukiman kumuh
- j. Kondisi drainase
- k. Proteksi kebakaran
- l. Kondisi jalan
- m. Jumlah kepala keluarga (KK)

2. Analisis pembobotan (skoring)

Analisis kriteria keberlanjutan yang tercapai melalui perubahan infrastruktur dengan evaluasi dampak jangka panjang terhadap pencapaian tujuan kota berkelanjutan. Pada analisis ini menggunakan metode analisis skoring untuk menyelesaikan rumusan masalah pertama pada penelitian ini. Menurut (Pamurti et al., 2023) dalam menentukan tingkat keberlanjutan berdasarkan hasil wawancara pada responden dengan menggunakan kuesioner yang tertera pada lampiran dapat menggunakan score melalui klasifikasi tingkat keberlanjutan pada tabel.

Skor untuk menentukan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Tabel 3. 3 skor permukiman kumuh

NO	Kriteria	Skor
1.	Kumuh Tinggi	5
2.	Kumuh Sedang	3
3.	Kumuh Rendah	1

[Sumber:(Pamurti et al.,2023)]

Berdasarkan tabel diatas nilai tertinggi 5 sedangkan nilai terendah 1, maka dapat dilakukan perhitungan dengan rumus interval tingkat kekumuhan sehingga dapat diketahui tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh pada permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Memiliki indikator yang menjadi ketentuan untuk menentukan kekumuhan yang ada di kecamatan Mariso Kota makassar yaitu:

1. Keteraturan bangunan

Keteraturan bangunan terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b) mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c) mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Kondisi bangunan

Bangunan, gedung, atau gedong adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.^[1] Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu

segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

3. Jalan lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan di desain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

4. Penyediaan air bersih dan air minum

Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.

Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air bersih, Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.

Menurut Permendagri Nomor. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air

Minum, Departemen dalam Negeri Republik Indonesia, Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

5. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

6. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah per satuan luas atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk atau population density dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.

7. Penghasilan rata – rata

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bahas secara umum apa yang dimaksud dengan penghasilan. Secara luas, penghasilan diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh individu, baik itu dari sumber-sumber yang bersifat tetap, misalnya gaji, upah, atau

dividen, maupun sumber-sumber yang bersifat tidak tetap, misalnya bonus atau hasil penjualan.

Secara singkat, penghasilan dapat disimpulkan sebagai jumlah total uang yang diperoleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dari semua sumber pendapatan yang dimilikinya.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup, penghasilan memainkan peran yang sangat penting. Penghasilan mempengaruhi kualitas hidup, status sosial, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Namun, penghasilan juga memiliki kekurangan dan dapat memengaruhi keseimbangan hidup dan kesehatan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami peran penghasilan dalam kehidupan dan melakukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghasilan dan kehidupan pribadi.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya meningkatkan penghasilan, baik itu melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kerja, berinvestasi, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup.

Interval untuk Tingkat Kekumuhan

Tabel 3. 4 skor tingkat kekumuhan

NO	Kriteria	Skor
1.	Kumuh Rendah	1,00 – 2,33
2.	Kumuh Sedang	2,34 – 3,67
3.	Kumuh Tinggi	3,68 – 5,00

[Sumber:(Pamurti et al.,2023)]

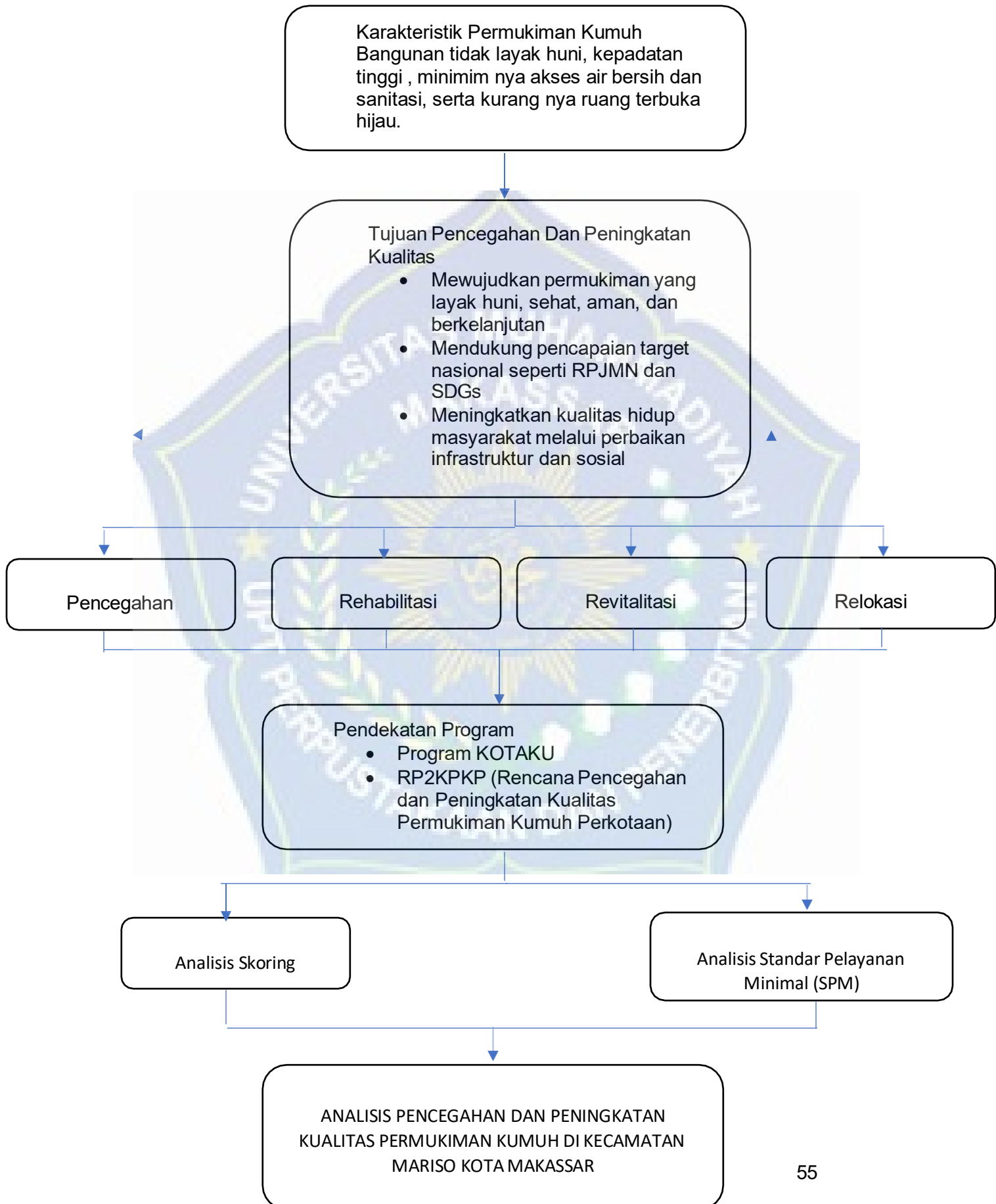
Indikator yang akan diteliti Analisis ini yaitu terdiri dari beberapa aspek meliputi aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Adapun indikator pada tiap aspek tersebut terdapat pada tabel di bawah akan dilakukan pembobotan sesuai standar menentukan kualitas permukiman kumuh Kecamatan Mariso Kota Makassar.

3. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permukiman perumahan rakyat

Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintah.

Standar pelayanan minimal (SPM) yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-6981-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN),

Kerangka Konsep



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

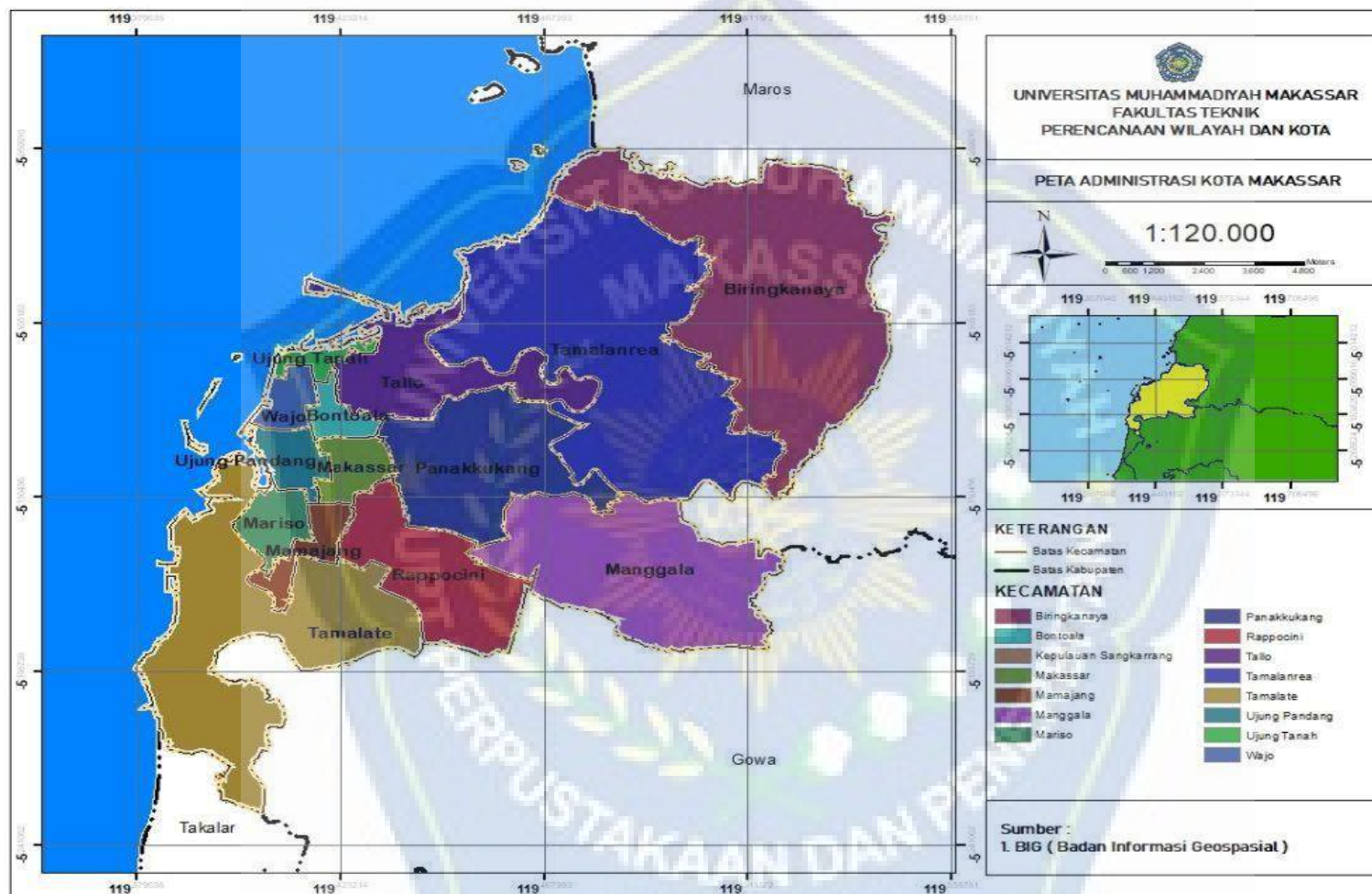
A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

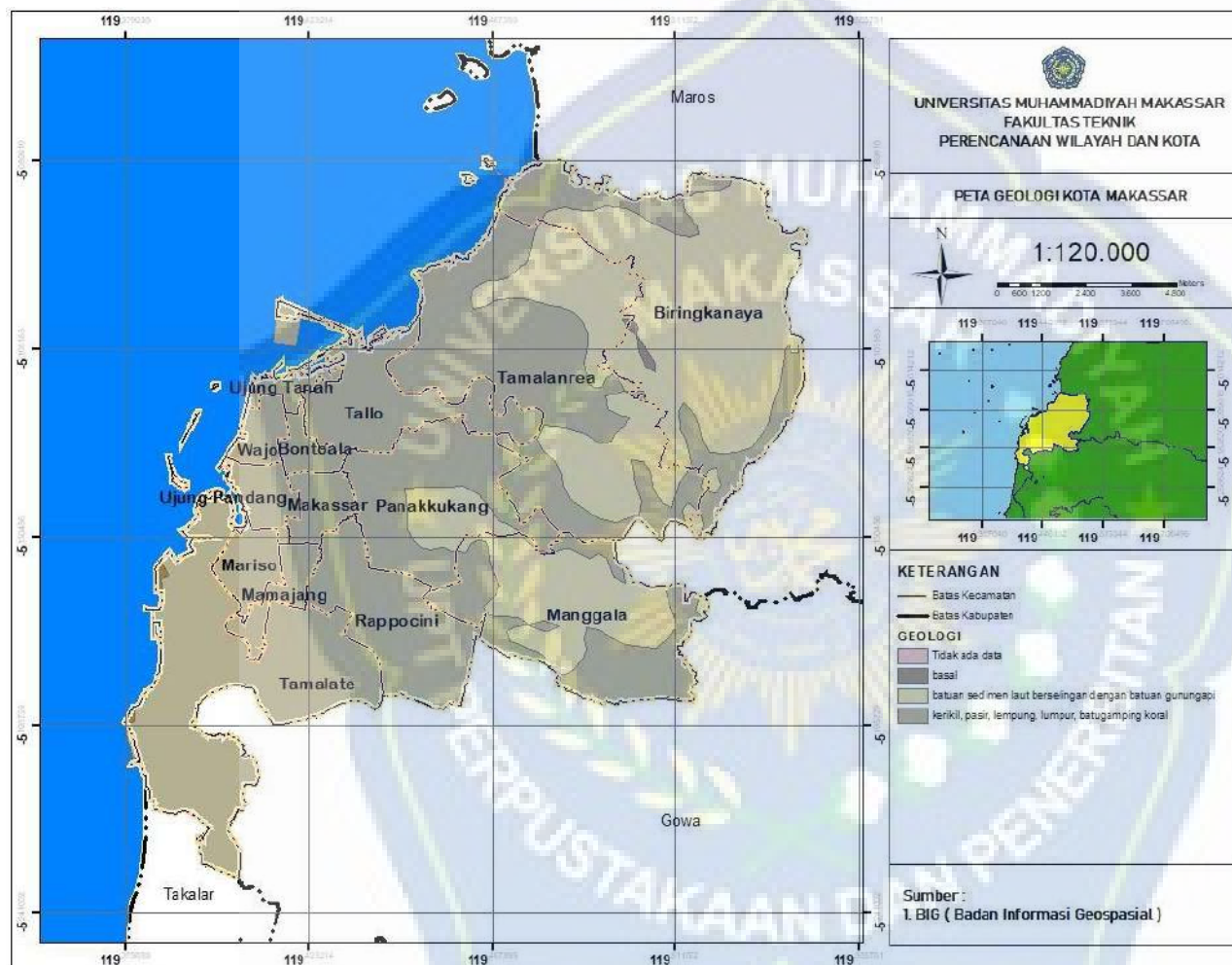
Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia Timur, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 17.560 Ha. Adapun Peta administrasi Kota Makassar dapat dilihat pada gambar secara administratif, Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan yang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Gowa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Selat Makassar. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

2. Kondisi Geografis Kota Makassar

Secara geografis, Kota Makassar terletak 119°4'29,038" - 119°32'35,781" Bujur Timur dan 4°58'30,052" - 5°14'0,146" Lintang selatan yang memiliki posisi strategis di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang menghubungkan laut Jawa dengan laut Sulawesi.



Gambar 4. 1 Peta administrasi kota makassar

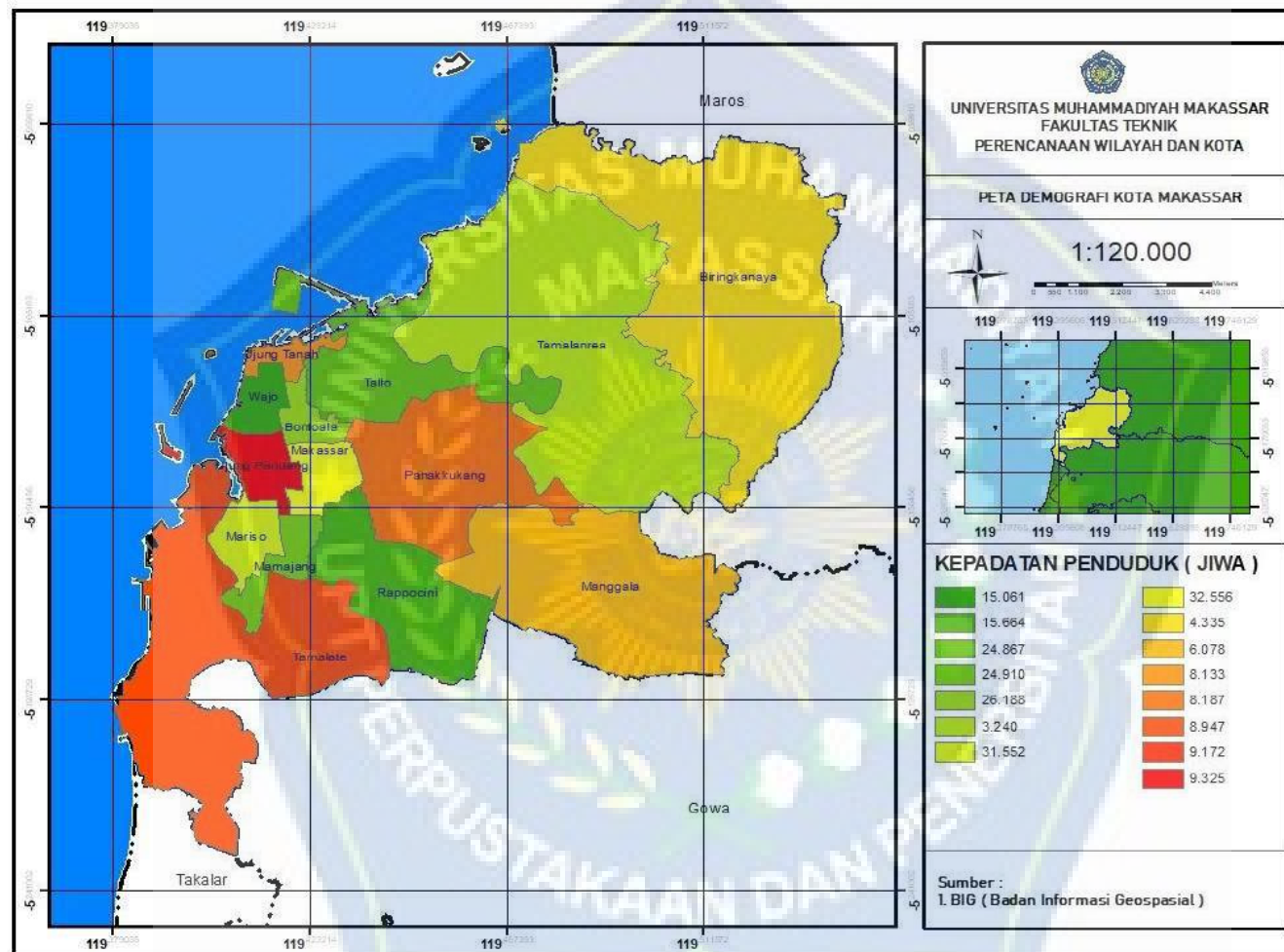


Gambar 4. 2 Peta Geologi Kota Makassar

3. Demografi Kota Makassar

Kota Makassar adalah, salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur dan memiliki populasi yang terus berkembang pesat. Berdasarkan data terakhir, populasi Makassar mencapai kurang lebih 1,5 juta jiwa. Sebagai Kota yang berperan penting dalam perekonomian, terutama di wilayah timur Indonesia Kota Makassar menjadi tujuan utama migrasi penduduk dari daerah pedesaan yang mencari pekerjaan dan kehidupan yang baik. Kondisi ini tentunya mempengaruhi jumlah penduduk dan perencanaan pembangunan di kota tersebut.

Isu kependudukan sangatlah penting karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan. Kepadatan penduduknya cukup tinggi, mengingat luas wilayah kota yang terbatas. Pertumbuhan penduduk ini didorong oleh urbanisasi yang signifikan, di mana banyak penduduk dari daerah sekitarnya, seperti kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan, pindah ke Makassar untuk mencari peluang ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan badan pusat statistik Kota Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir terdapat pada tabel berikut:



Gambar 4. 3 Peta Demografis Kota Makassar

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mariso	60.499	57.426	57.594	57.795	58.730
2.	Mamajang	61.452	56.049	56.056	56.094	58.293
3.	Tamalate	205.541	180.824	181.533	182.348	188.432
4.	Rappocini	170.121	144.587	144.619	144.733	150.613
5.	Makassar	85.515	82.067	82.142	82.265	82.237
6.	Ujung pandang	29.054	24.526	24.526	24.541	24.851
7.	Wajo	31.453	29.972	30.033	30.110	29.503
8.	Bontoala	57.197	54.996	55.102	55.239	55.201
9.	Ujung Tanah	35.534	35.789	35.947	36.127	36.745
10.	Tallo	140.330	144.977	145.400	145.908	148.055
11.	Panakkukang	140.330	139.590	139.635	139.759	144.204
12.	Manggala	149.487	146.724	147.549	148.462	160.466
13.	Biringkanaya	149.487	209.048	210.076	211.228	215.820
14.	Tamalanrea	220.456	103.177	103.220	103.332	106.262
15.	Kep. sangkarrang	14.531	14.125	14.187	14.258	14.981
Makassar		1.480.480	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.474.393

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka, 2019-2024

4. Persebaran Kawasan Kumuh Kota Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor:2821/648/Tahun 2022, terdapat kawasan kumuh yang terbesar di 15 kecamatan di Kota Makassar dengan luas total mencapai 403,20 hektar. Penetapan ini menunjukkan adanya tantangan kualitas lingkungan perkotaan di wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 4 2 Sebaran Kumuh Kota Makassar

NO	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Makassar	4	83,39
2.	Rappocini	4	476,25
3.	Tamalate	3	217,61
4	Mariso	4	102,59
5.	Mamajang	5	80,48
6.	Biringkanaya	8	3,076,54
7.	Tamalanrea	4	2,074,76
8.	Manggala	4	783,81
9.	Panakkukang	2	256,12
10	Ujung Pandang	6	200,97
11	Tallo	1	17,15
12.	Bontoala	5	87,78
13.	Wajo	7	180,66
14.	Ujung Tanah	4	70,68
15.	Kep. Sangkarrang	0	0
	Total	61	

Sumber data : surat keputusan (SK) Walikota Nomor 2821/648/Tahun 2022

Pemerintahan daerah perlu fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program-program penataan serta pengembangan infrastruktur dasar untuk mengatasi kondisi kekumuhan ini. Upaya tersebut meliputi perbaikan fasilitas sanitasi, sistem drainase, Penyediaan air bersih, dan infrastruktur lainnya yang esensial untuk menciptakan lingkungan yang layak huni dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan-kawasan tersebut.

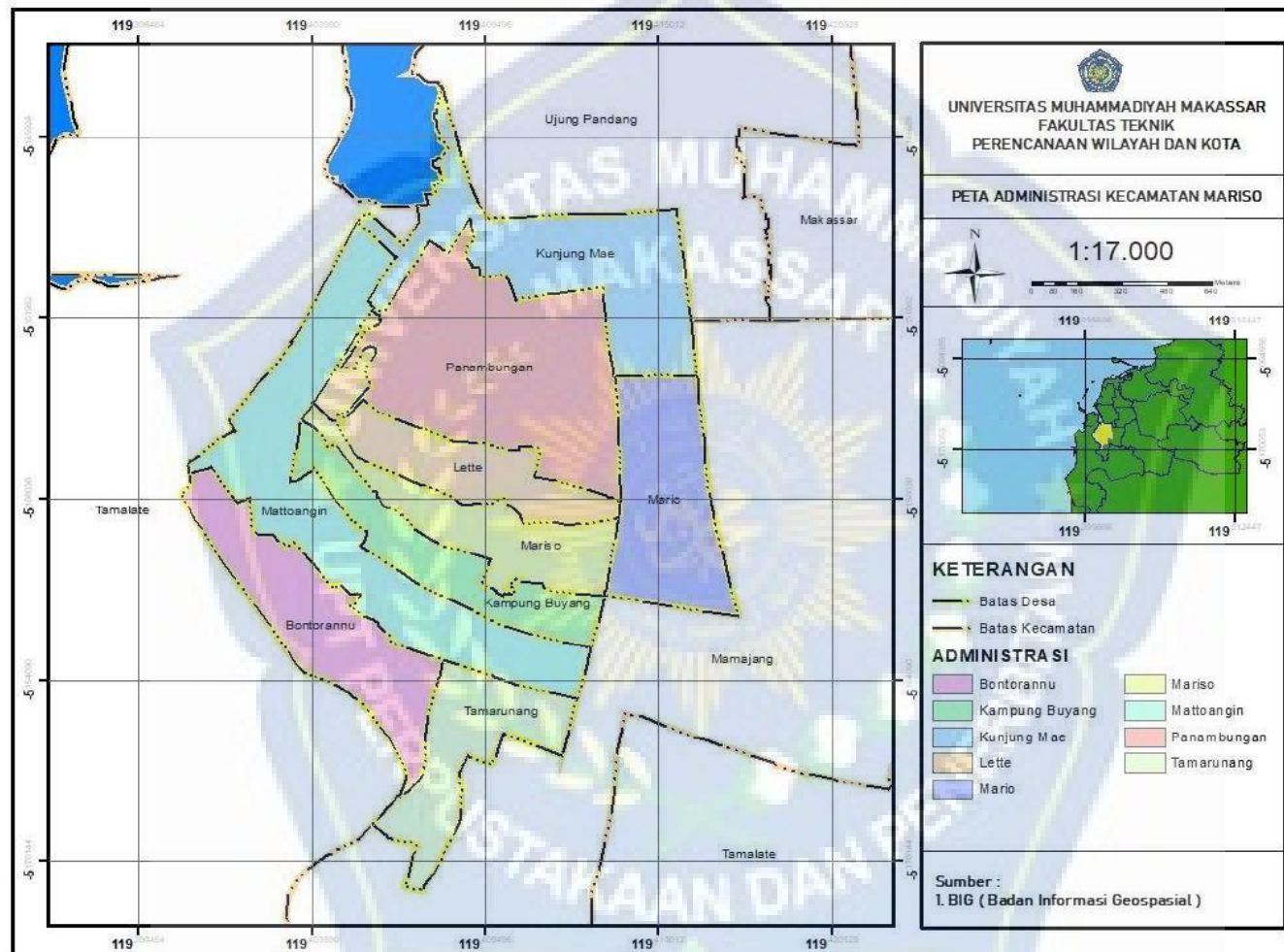
B. Gambaran Umum Kecamatan Mariso

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

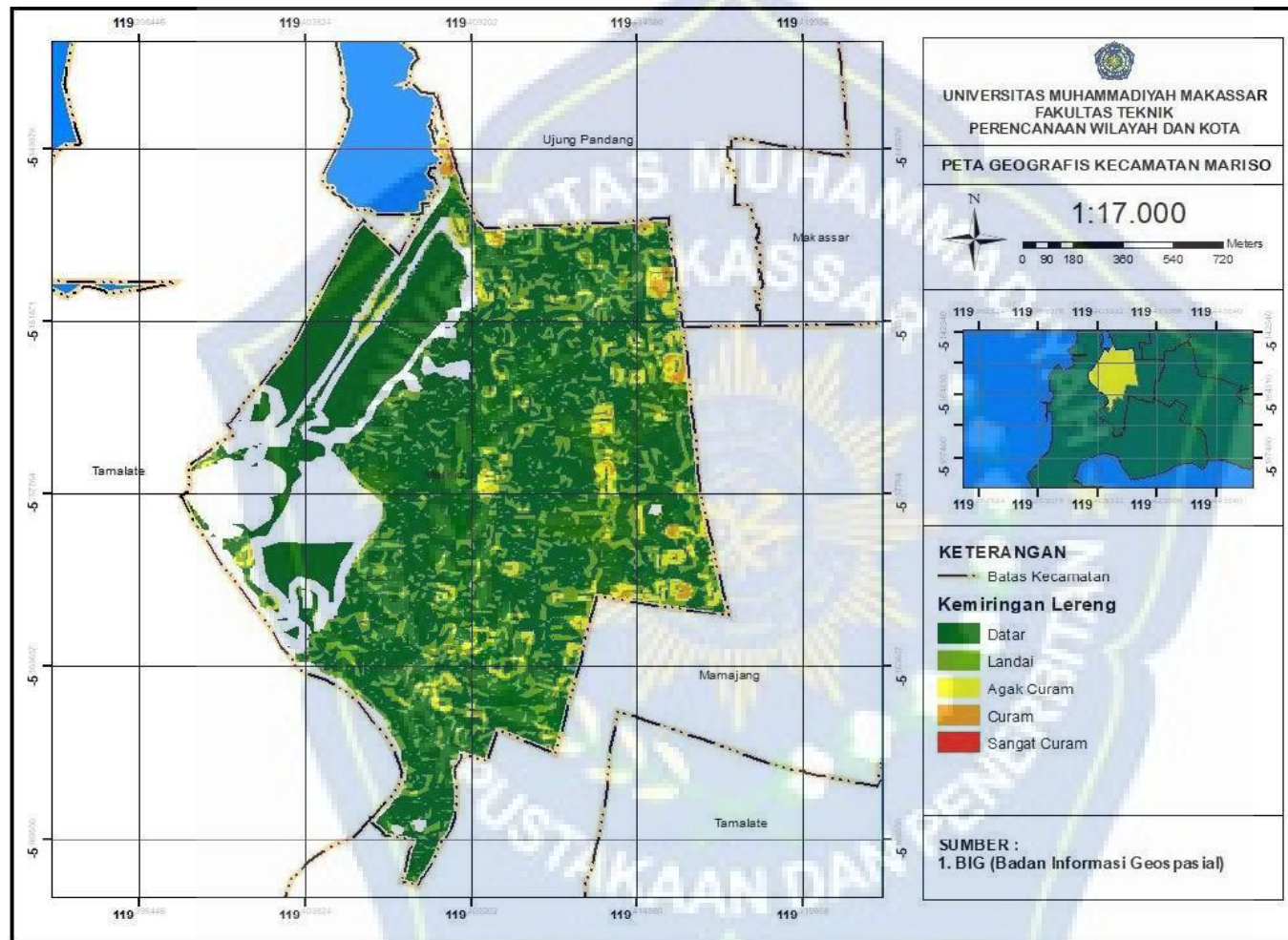
Kecamatan Mariso merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan wilayah terluas *urban fringe* dari wilayah administrasi kota Makassar, Kecamatan Mariso memiliki Luas Wilayah 1,82 Km² dan terletak $\pm$ 3 km sebelah barat dari ibu kota makassar. Persentase luas wilayah Kecamatan Mariso Terhadap Luas Kota Makassar adalah 1,04%. Kecamatan Mariso memiliki 9 kelurahan yaitu, Bontomarannu, Tamarunang, Mattoangin, Kampung Buyang, Mariso, Lette, Mario, Panambungan, Kunjung Mae.

2. Kondisi Geografis Kecamatan Mariso

Secara Geografis Kecamatan Mariso pinggiran yang berbatasan langsung dengan wilayah terluas *urban fringe* dari wilayah administrasi kota Makassar, Kecamatan Mariso memiliki Luas Wilayah 1,82 Km² dan terletak $\pm$ 3 km sebelah barat dari ibu kota makassar sedangkan batas-batas wilayah administrasi dari letak kecamatan mariso, antara lain : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung pandang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mamajang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate, sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Persentase luas wilayah Kecamatan Mariso Terhadap Luas Kota Makassar adalah 1,04%.



Gambar 4. 4 Peta Admistrasi Kecamatan Mariso



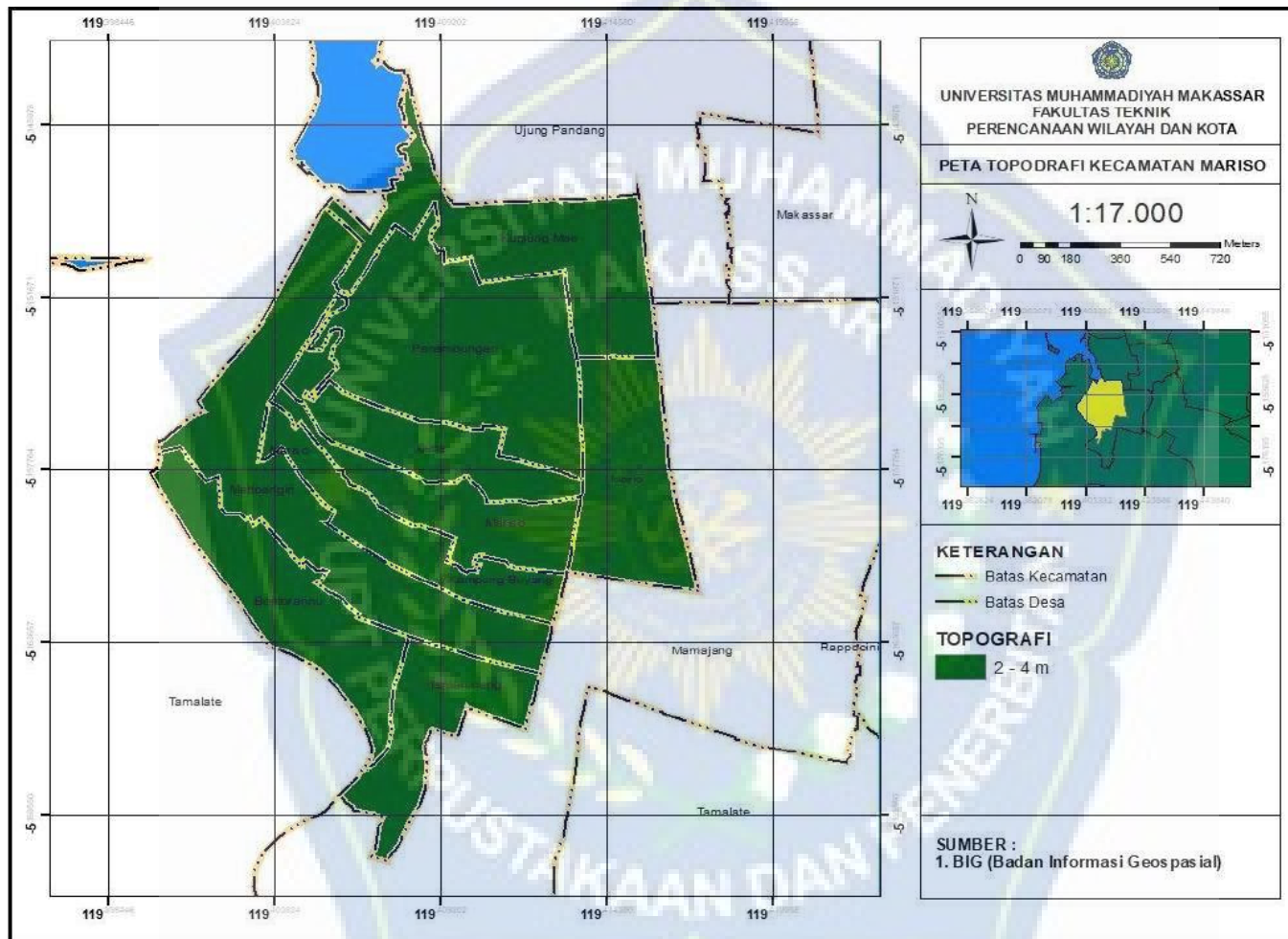
Gambar 4. 5 Peta Geografis Kecamatan Mariso

3. Kondisi Topografi dan Iklim Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso Merupakan Daerah Bukan Pantai dengan aspek topografi terdiri dari 100 daerah datar karena 0 untuk tidak terdapat daerah berbukit. Sedangkan, ketinggian wilayahnya mencapai sampai dengan 5 meter dari permukaan laut. Walaupun bukan pantai tetapi Kecamatan Mariso terletak di wilayah pesisir pantai barat Kota Makassar. Pantai Kecamatan Mariso pada umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan temok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pengkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan TPI Rajawali serta daerah permukiman komunitas nelayan di pesisir pantai Losari.

Kecamatan Mariso memiliki Topografis datar hingga landai, karena berada di wilayah pesisir barat Kota Makassar, wilayah ini berbatasan langsung dengan selat Makassar di sebelah barat, sehingga sebagian kawasan memiliki karakteristik pantai dan lahan rendah. Tidak terdapat perbukitan atau dataran tinggi yang signifikan, menjadikan cocok untuk permukiman aktivitas perkotaan.

Kecamatan Mariso berada dalam iklim tropis lembab, khas wilayah Indonesia bagian tengah, suhu rata-rata tahunan berkisaran antara 26°C sehingga 32°C, dengan kelembaban tinggi sepanjang tahun, curah hujan cukup tinggi, terutama pada bulan November hingga April yang merupakan musim hujan, musim kemarau biasanya berlangsung dari Mei hingga Oktober, dengan intensitas hujan yang lebih rendah dan suhu yang cenderung lebih panas.



Gambar 4. 6 Peta Topografi Kecamatan Mariso

4. Geologi dan Struktur Batuan Kecamatan Mariso

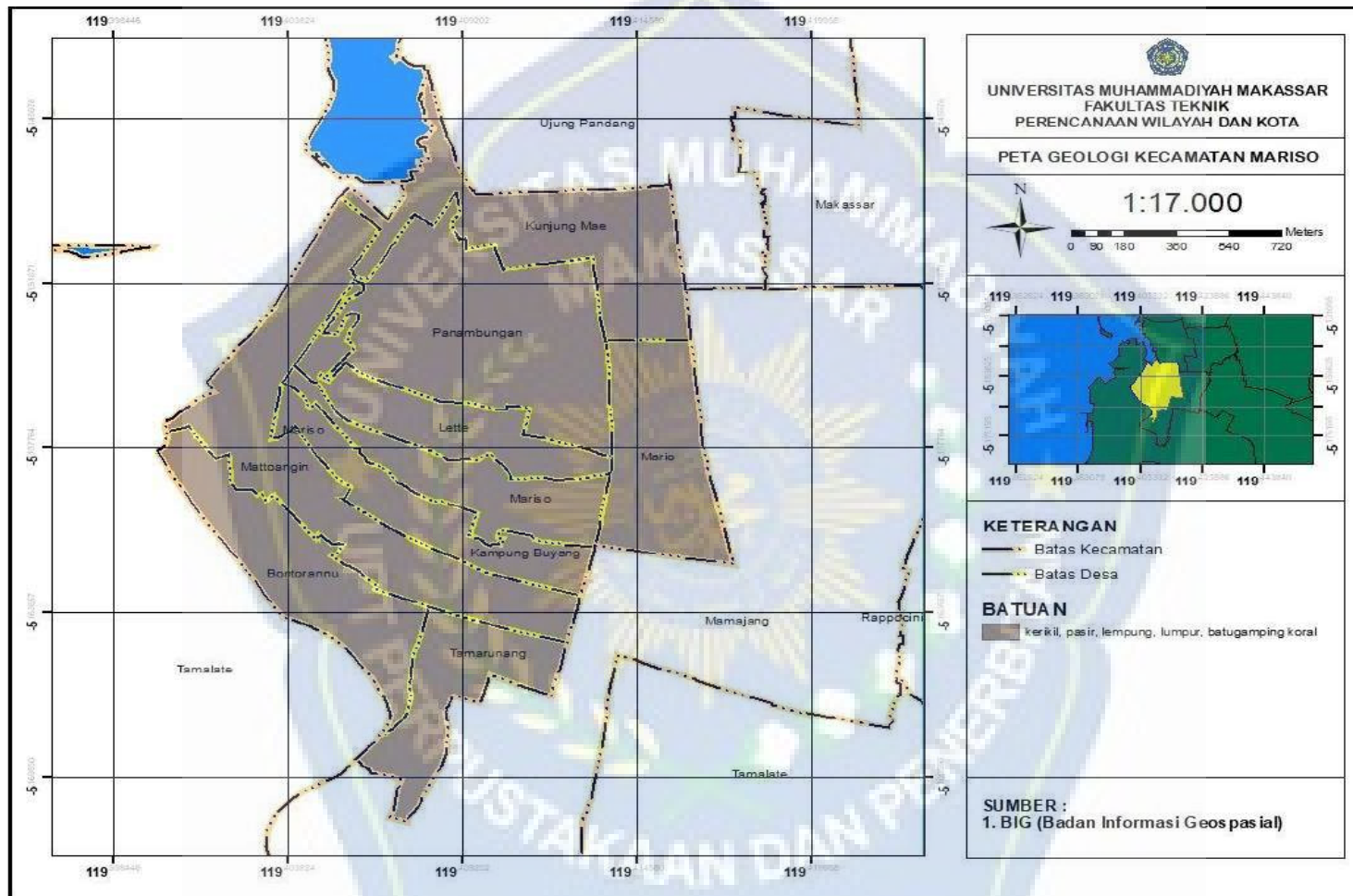
kecamatan Mariso, merupakan bagian dari Kota Makassar, memiliki geologi dan struktur batuan yang beragam. Secara umum , geologi wilayah ini dipenuhi oleh beberapa faktor utama seperti jenis batuan, formasi geologi, dan aktivitas tektonik. Berikut adalah gambaran umum tentang geologi dan struktur batuan di Kecamatan Mariso:

a) Geologi di Kecamatan Mariso Kota Makassar

- Secara umum, wilayah Makassar relatif stabil tanpa adanya struktur patahan lipatan atau kekar yang aktif
- Namun, secara regional Sulawesi dilalui beberapa sesar besar seperti Palu - koro walanae, Matono, Batui, dsb. Meski demikian, wilayah Mariso sendiri belum tercatat sebagai zona sesar aktif utama.

Kecamatan Mariso terletak pada wilayah pesisir barat Kota Makassar, yang secara geologi termasuk dalam Zona Lempeng Mikro Sulawesi Selatan, wilayah ini didominasi oleh endapan aluvial dan sedimen kuartar yang terbentuk dari proses pengendapan sungai dan laut.

Batuan yang mendominasi adalah batuan sedimen, seperti pasir, lempung dan lanau, yang berasal dari proses pengendapan di lingkungan pesisir dan delta, di beberapa titik, terutama dekat garis pantai, terdapat endapan pantai berupa pasir halus dan kerikil yang terbentuk dari abrasi laut. Kecamatan Mariso tidak ditemukan batuan beku atau metamorf dalam skala besar di wilayah ini karena karakter geologinya lebih ke arah dataran rendah dan pesisir.



Gambar 4. 7 Peta Geologi Kecamatan Makassar

5. Kondisi Hidrologi Kecamatan Mariso

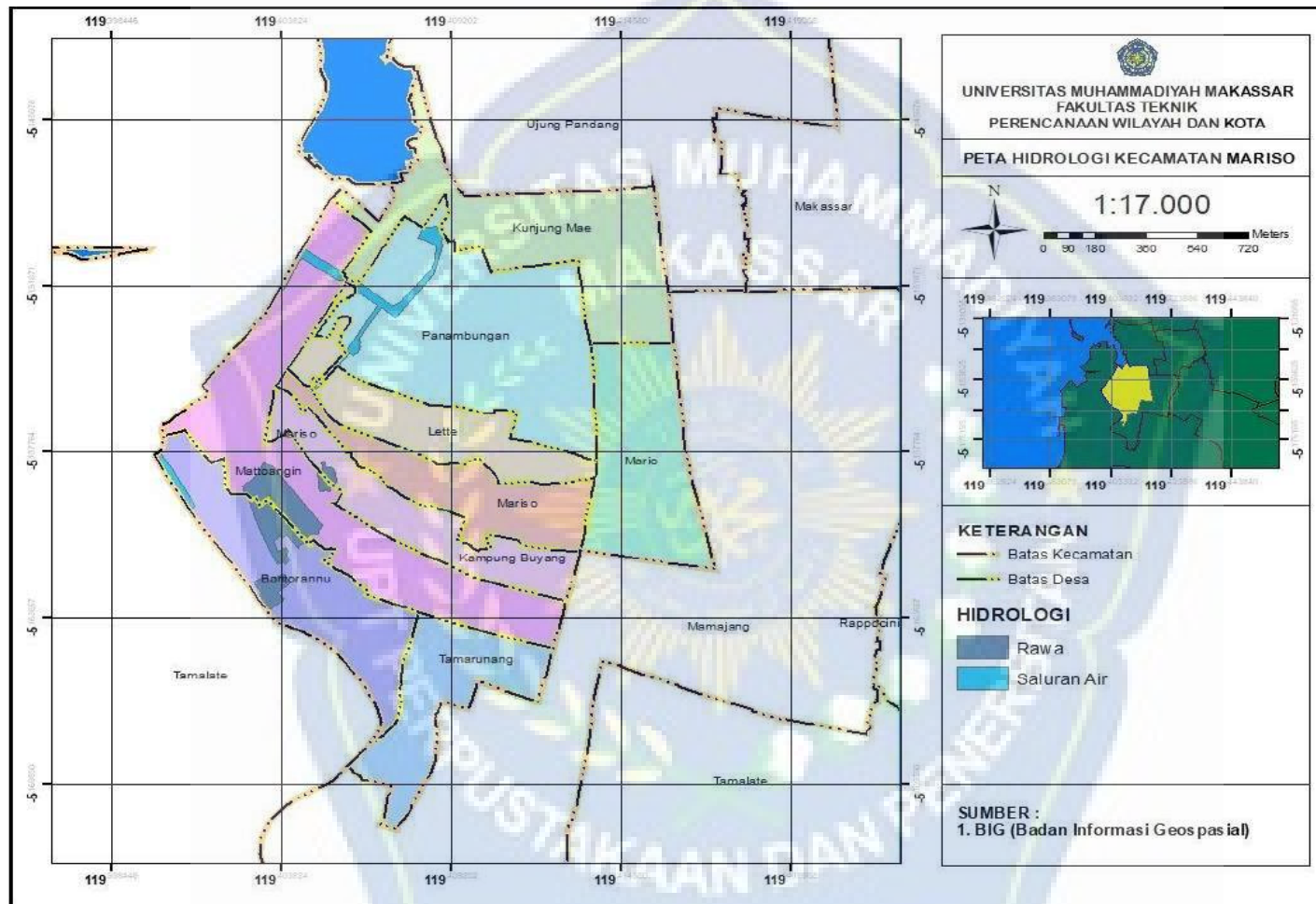
Kecamatan Mariso, yang terletak di Kota Makassar memiliki kondisi hidrologi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti keberadaan sungai, drainase perkotaan dan curah hujan. Berikut adalah gambaran umum mengenai kondisi hidrologi di Kecamatan Mariso:

a). Curah hujan

- Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah hujan 1mm adalah air hujan tinggi 1mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 m² dengan asumsi tidak ada yang meluap, mengalir dan meresap

b). Drainase

- Sistem drainase: efektivitas sistem drainase di Kecamatan Mariso sangat penting dalam mengolah aliran air permukaan. Drainase yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan genangan air dan banjir lokal terutama selama periode curah hujan tinggi.
- Kanal : selain drainase, Wilayah Kecamatan Mariso juga memiliki sistem kanal yang dirancang untuk mengolah aliran air permukaan yang sangat kurang terawat



Gambar 4. 8 Peta Hidrologi Kecamatan Mariso

6. Kondisi Demografi Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan salah satu Kecamatan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Penduduk Kecamatan Mariso pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 58.596 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 29.221 jiwa laki-laki dan 29.375 jiwa perempuan, dengan demikian maka rasio jenis kelamin sebesar 99,69 angka ini menunjukkan bahwa pad 100 penduduk perempuan ada 99-100 penduduk laki-laki dengan luas wilayah 1,82 Km², maka kepadatan penduduk di Kecamatan Mariso yaitu 32.382 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu kelurahan Tamarunang dengan 52.025 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Di kecamatan Mariso

NO	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bontomarannu	3.116	3.059	6.175
2.	Tamarunang	3.210	3.050	6.260
3.	Mattoangin	1.813	1.918	3.731
4.	Mariso	4.195	4.226	8.421
5.	Mario	1.993	2.060	4.053
6.	Panambungan	5.890	5.916	11.086
7.	Kampung buyang	2.065	2.062	4.127
8.	Lette	4.908	4.982	9.890
9.	Kunjung Mae	2.031	2.102	4.133
Jumlah		29.221	29.375	58.596

{Sumber Data Sekunder Kecamatan Mariso}

7. Penyebaran Kawasan Kumuh Kecamatan Mariso

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar Nomor: 2821/648/Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan Dan peningkatan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Makassar Tahun 2022. Terdapat 8 kawasan permukiman kumuh yang ada di kecamatan Mariso Kota Makassar, dan terbagi menjadi 2 kategori yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas ada beberapa kelurahan yang masuk kategori pencegahan yaitu, kelurahan Kampung Buyang, Kelurahan Mattoangin, Kelurahan Lette, Kelurahan Mariso. Beberapa kelurahan yang masuk kategori peningkatan kualitas yaitu, Kelurahan Bontorannu, Kelurahan Panambungan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Kunjung Mae.

Tabel Lokasi Pencegahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Tabel 4. 2 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh

NO	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Jiwa	Kepadatan (Jiwa / Ha)
1.	Mariso	Kampung Buyang	19,63	3845	196
2.	Mariso	Mattoangin	41,51	4213	101
3.	Mariso	Mariso	20,93	8274	395
4.	Mariso	Lette	20,52	9561	466

Sumber data surat keputusan (SK) Walikota Nomor 2821/648/Tahun 2022

Tabel Lokasi Peningkatan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas (Ha)	Jumlah jiwa
Bantaran Kanal Jongaya	Mariso	Bontorannu	RT02/RW05	0,38	220
	Mariso	Bontorannu	RT03/RW02	1,77	397
	Mariso	Bontorannu	RT03/RW04	0,63	287
	Mariso	Bontorannu	RT03/RW05	0,57	171
	Mariso	Bontorannu	RT04/RW04	0,50	222
	Mariso	Bontorannu	RT01/RW04	0,69	184
	Mariso	Bontorannu	RT02/RW02	0,63	487
	Mariso	Bontorannu	RT02/RW03	1,15	221
	Mariso	Bontorannu	RT02/RW04	0,57	254
	Mariso	Bontorannu	RT03/RW03	0,72	394
	Mariso	Bontorannu	RT04/RW02	1,28	90
	Mariso	Bontorannu	RT04/RW03	0,96	245
	Mariso	Bontorannu	RT01/RW01	0,33	294
	Mariso	Tamarunang	RT01/RW02	1,50	179
	Mariso	Tamarunang	RT01/RW05	0,70	165
	Mariso	Tamarunang	RT02/RW01	2,18	316
	Mariso	Tamarunang	RT02/RW02	0,68	198
	Mariso	Tamarunang	RT02/RW05	0,65	255
	Mariso	Tamarunang	RT03/RW05	0,40	160

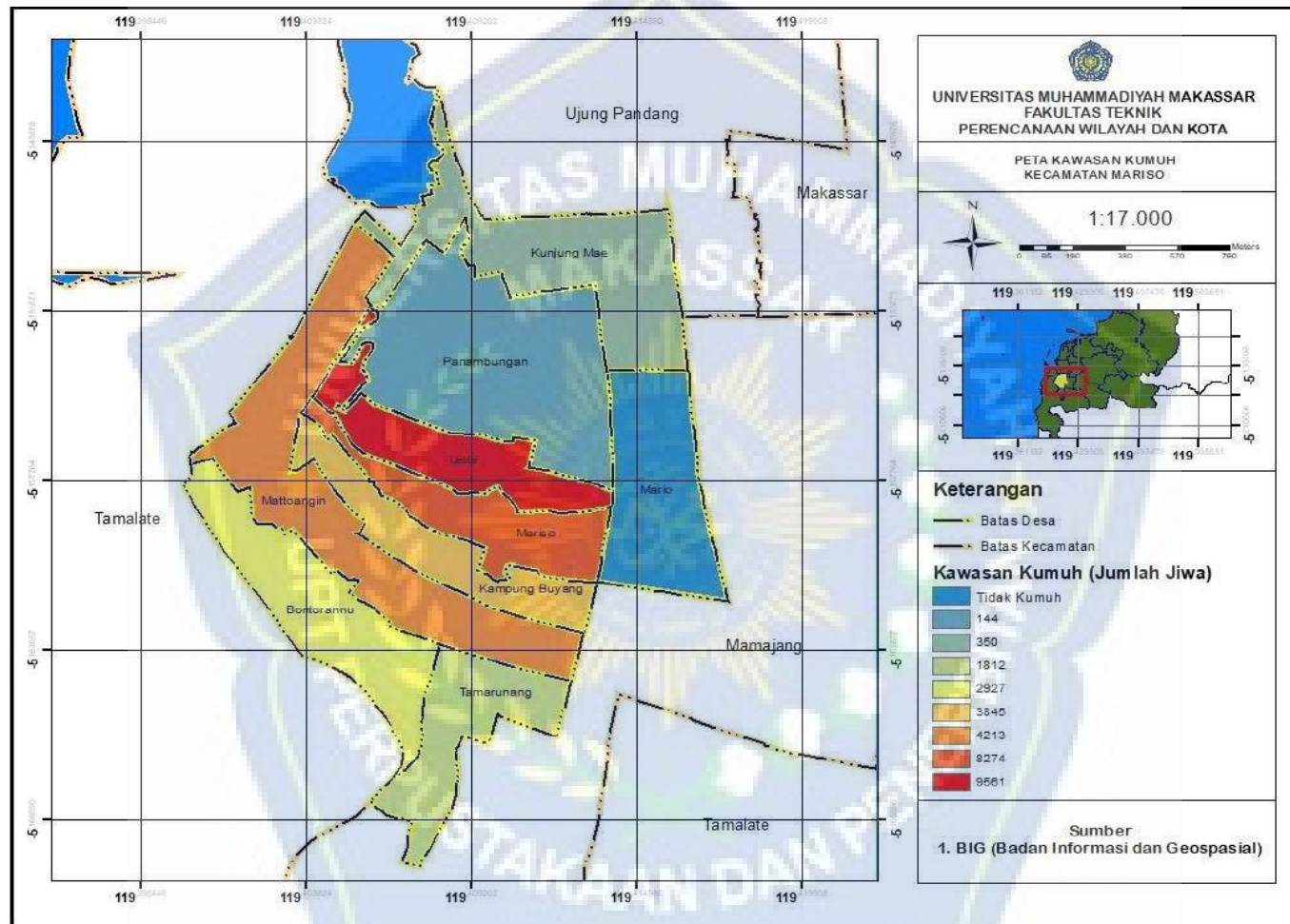
Sumber data surat keputusan (SK) Walikota Nomor 2821/648/Tahun 2022

Tabel Lokasi Peningkatan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Tabel 4. 3 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh

kawasan	Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas (Ha)	Jumlah jiwa
Kawasan Mariso	Mariso	Panambungan	RT03/RW08	0,69	144
	Mariso	Kunjung Mae	RT03/RW02	0,39	168
	Mariso	Kunjung Mae	RT03/RW03	1,51	80
	Mariso	Kunjung Mae	RT09/RW02	0,18	102

Sumber: data surat keputusan (SK) Walikota Nomor 2821/648/Tahun 2022



Gambar 4. 9 Peta Kawasan Kumuh Kecamatan Mariso

8. Kondisi Aspek permukiman Kumuh Kecamatan Mariso

a. Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan merujuk pada sejauh mana suatu bangunan dirancang dan dibangun dengan aturan atau pola tertentu secara terstruktur, kenyamanan, estetika, dan terutama dalam resistensi terhadap gempa

1. Keteraturan dalam Rencana (Horizontal)

Bangunan dikatakan teratur dalam rencana jika:

- Bentuk denah simetris dan tidak banyak tonjolan atau lekukan ekstrem.
- Distribusi massa dan kekuatan merata
- Tidak ada overhang atau bagian bangunan yang terlalu menonjol keluar.
- Jumlah bukaan (jendela/pintu) merata dan seimbang

2. Keteraturan dalam Vertikal

- Tinggi antara lantai seragam.
- Sistem struktur(kolom,blok,dinding) berkelanjutan dari bawah ke atas.
- Beban dan kekakuan didistribusikan secara simetris dan tidak berubah drastis

3. Manfaat keteraturan bangunan

- Tahan gempa lebih baik karena distribusi gaya lebih merata
- Lebih mudah dibangun dan dirancang
- Efisiensi biaya dalam perencanaan struktur.
- Keamanan struktur lebih terjamin.



Gambar 4. 10 Keteraturan Bangunan Di Kecamatan Mariso

Sumber data : google earth, Tahun 2022

b. Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik bangunan mengacu pada keadaan nyata atau kualitas struktur dan elemen-elemen sebuah bangunan berdasarkan hasil pengamatan atau pemeriksaan. Ini mencakup aspek struktur utama.



Gambar 4. 11 Bangunan Kecamatan Mariso

c. Kondisi Jalan Lingkungan

Kondisi jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso ada beberapa jalan yang baik dan ada juga beberapa jalan yang kurang perawatan dikarenakan adanya di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Mariso.



Gambar 4. 12 Kondisi Jalan lingkungan Kecamatan Mariso

d. Penyediaan Air Bersih dan Air Minum

Penyediaan Air bersih dan Air minum di kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Mariso hampir seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Mariso hampir semua masyarakat memiliki Air bersih yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Adapun masyarakat yang memiliki sumber air bersih lainnya yaitu sumur, dan sumur bor, terdapat di salah satu kelurahan di Kecamatan Mariso yang memiliki PAMSIMAS.



Gambar 4. 13 Air Minum Dan Air Bersih Kecamatan Mariso

e. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah tingkat rumah tangga terbilang baik yaitu sekitar 88,2% masyarakat Kota Makassar mengumpulkan dan membuang sampah di TPS. Hal ini disebabkan keseriusan dari pemerintah kota Makassar sendiri yang rutin mengangkut sampah masyarakat setiap hari. Namun ternyata masih ada saja masyarakat yang membuang sampah ke sungai/kanal maupun ke drainase lingkungan, sehingga apabila musim hujan tiba sering terjadi banjir diakibatkan saluran menjadi tersumbat.

Sasaran dalam pengelolaan sistem persampahan yaitu untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah sebagai sumber daya. Untuk daerah pelayanan tempat penampungan sampah sementara tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Makassar. Prinsip pengelolaan sampah yaitu dikelola dari sumbernya dengan prinsip 5R(*reuse, reduce, recycle, replace, and rethink*). Sistem pengelolaan persampahan terdiri atas:

f. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah persatu luas. Di wilayah Kecamatan Mariso

kepadatan penduduk yang sangat banyak jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Mariso yaitu 58.596 ribu jiwa, yang memiliki jumlah penduduk yang terbanyak di skala kelurahan Kecamatan Mariso yaitu kelurahan Panambungan sebesar 11.806 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil skala kelurahan Kecamatan Mariso yaitu Kelurahan Mattoanging sebanyak 3.731 ribu jiwa.

g. Penghasilan Rata- Rata

Penghasilan Rata-Rata di kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Mariso, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Permukiman Kumuh memiliki penghasilan yang berbeda-beda, yaitu:

Sebagai buruh harian lepas, dan ada juga masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yang bermukim di bantaran Kanal Jongaya, di kelurahan Bontorannu,

Tabel 4. 4 penghasilan Rata- Rata di Kecamatan Mariso

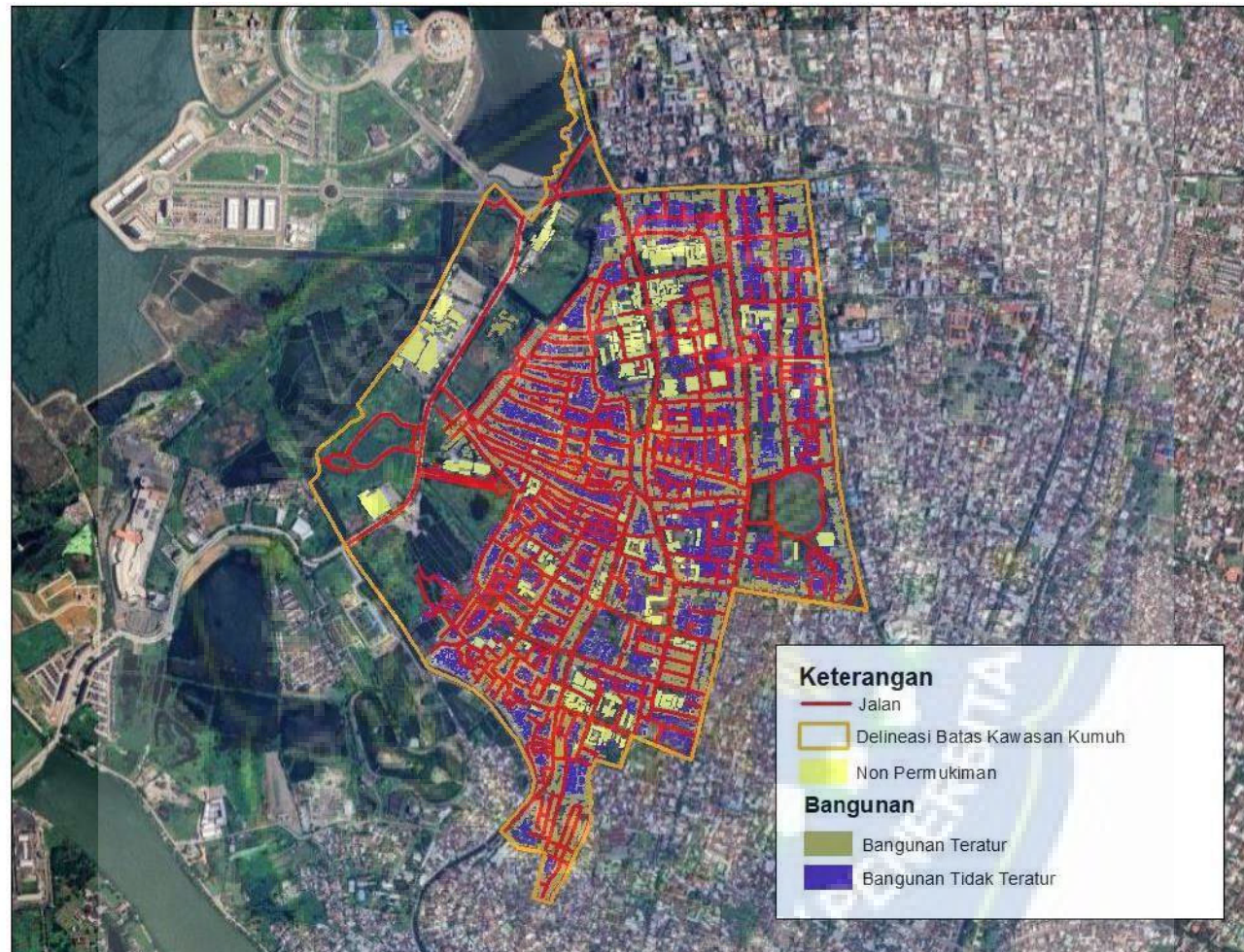
No	Kelurahan	Pendapatan Harian	Pendapatan Mingguan	Pendapatan Bulanan
1.	Bontorannu	25.000	150.000	650.000
2.	Tamarunang	50.000	300.000	1.300.000
3.	Mattoanging	35.000	210.000	910.000
4.	Kunjung Mae	30.000	180.000	780.000
5.	Kampung Buyang	35.000	210.000	910.000
6.	Mario	200.000	1.200.000	5.200.000
7.	Mariso	80.000	480.000	2.080.000
8.	Lette	50.000	300.000	1.300.000
9.	Panambungan	20.000	120.000	520.000

Sumber data: Daftar Kemiskinan Kecamatan Mariso, Tahun 2023

9. Analisis Skoring/ Pembobotan

Dalam analisis ini akan menentukan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan hasil survey lapangan terkait peningkatan kualitas Permukiman Kumuh, melakukan observasi dan wawancara masyarakat yang ada di kawasan permukiman kumuh yang akan dilakukan analisis skoring/pembobotan untuk menentukan tingkat kekumuhan yang ada di kecamatan Mariso,

Perhitungan skoring/pembobotan ini dihitung berdasarkan 7 indikator yang ada di kawasan permukiman Kumuh, untuk menghasilkan hasil tingkat kekumuhan sedang, rendah, dan tinggi yang ada di Kawasan permukiman Kumuh Kecamatan Mariso Kota Makassar, adapun indikator yang memiliki skor 3 hal ini mengindikasikan bahwa kawasan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Mariso sudah banyak yang dibenahi, dari bangunan dan kondisi lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Mariso Kota Makassar.



Gambar 4. 14 Peta Keteraturan bangunan Kecamatan Mariso

Profil Kawasan Kumuh Di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Kecamatan Mariso			Dokumentasi
Jumlah penduduk	58.596 jiwa		
Jumlah Bangunan	22.139 unit		
Kecamatan	Mariso		
Kota	Makassar		
Permasalahan Kawasan:			
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani di kawasan Permukiman kumuh di Kecamatan Mariso b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan di kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso c. Masih banyaknya jalan lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis di kawasan permukiman kumuh di kecamatan Mariso d. Tidak adanya sarana prasarana untuk proteksi kebakaran di kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso			
Penilaian Kekumuhan (Fisik)			
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter	
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	
	c. Persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	40% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	
Kondisi penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum	
	b. Cakupan pelayanan	80% populasi Cakupanair minum	
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan	
	b. Area terjadi genangan	20% area yang terjadi genangan	
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan	
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki persyaratan teknis	
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratan teknis	
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis	
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis	
Kondisi proteksi kebakaran	a. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	
	b. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	



Kelurahan Bontorannu			Dokumentasi
Jumlah penduduk	6.175 jiwa		
Kelurahan	Bontorannu		
Kecamatan	Mariso		
Kota	Makassar		
Permasalahan Kawasan			
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani			
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan			
Penilaian Kekumuhan (Fisik)			
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter	
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	
	c. Persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	30% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	
Kondisi penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum	
	b. Cakupan pelayanan	80% populasiCakupanair minum	
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan	
	b. Area terjadi genangan	20% area yang terjadi genangan	
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan	
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki persyaratan teknis	
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratn teknis	
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis	
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis	
Kondisi proteksi kebakaran	a. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	
	b. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	





Kelurahan Kampung Buyang		
Jumlah penduduk	4.127 jiwa	
Kelurahan	Kampung Buyang	
Kecamatan	Mariso	
Kota	Makassar	
Permasalahan Kawasan		
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani		
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	55% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. Persyaratan Teknis	56% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	35% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cakupan pelayanan	80% populasiCakupanair minum
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	20% area tidak memiliki genangan
	c. Kualitas Konstruksi	75% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	25% area memiliki sarana sesua persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	a. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	b. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

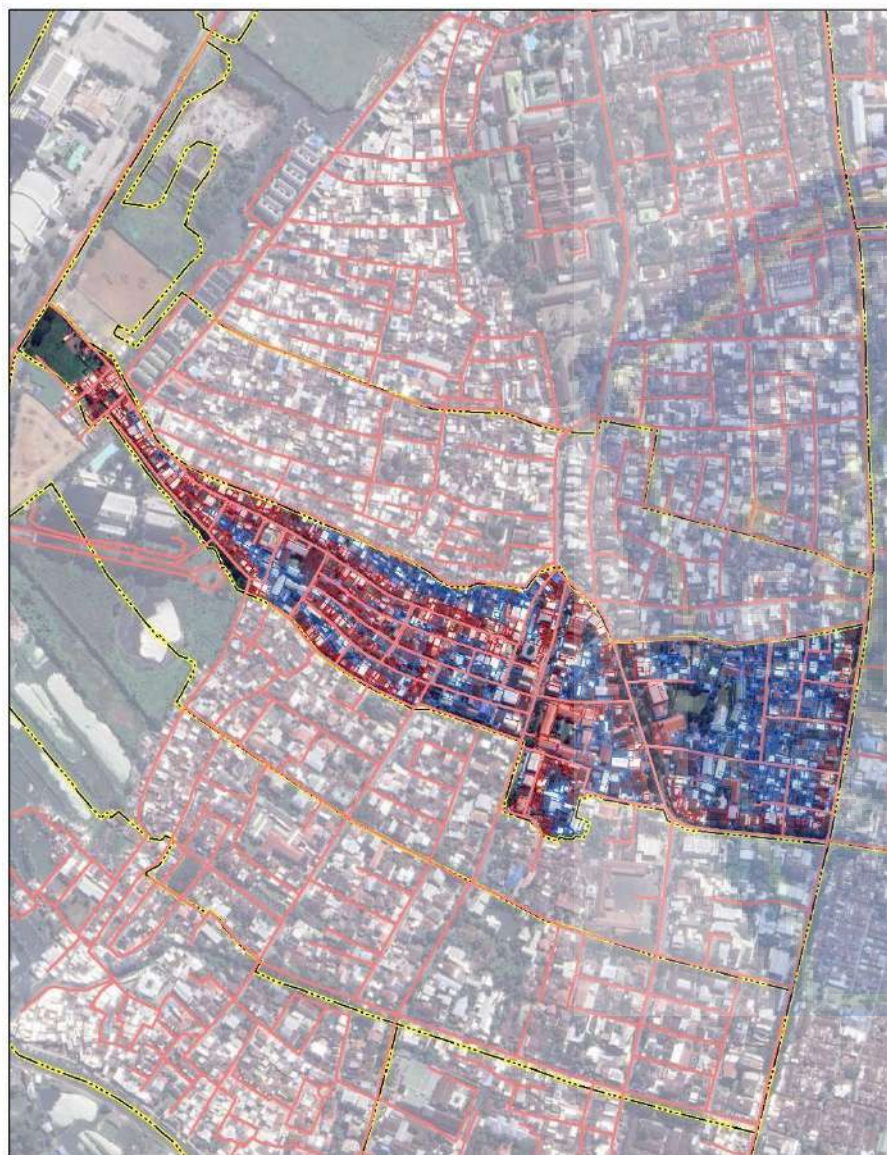


Kelurahan Kunjung Mae		
Jumlah penduduk	4.133 jiwa	
Kelurahan	Kunjung Mae	
Kecamatan	Mariso	
Kota	Makassar	
Permasalahan Kawasan		
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani		
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. Persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	30% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi Penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cakupan pelayanan	80% populasiCakupanair minum
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki Persyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai Persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	a. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	b. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran



Kelurahan Lette		
Jumlah penduduk	9.890 jiwa	
Kelurahan	Lette	
Kecamatan	Mariso	
Kota	Makassar	
Permasalahan Kawasan		
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani		
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan		
c. Akses jalan masih banyak yang bagus		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	40% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	55% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi Penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cakupan pelayanan	80% populasi Cakupan air minum
Kondisi draina selingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	20% area tidak terjadi genangan
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	c. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	d. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran





Kelurahan Mariso		
Jumlah penduduk	8.421 jiwa	
Kelurahan	Mariso	
Kecamatan	Mariso	
a. Kota terlayani b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan c. Akses jalan banyak yang buruk		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	40% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi Penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cakupan pelayanan	80% populasiCakupanair minum
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	20% area yang tidak terjadi genangan
	c. Kualitas Konstruksi	60% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaanair limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki pesyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	a. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	b. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Dokumentasi





Kelurahan Mattoangin		
Jumlah penduduk	3.731 jiwa	
Kelurahan	Mattoangin	
Kecamatan	Mariso	
Kota	Makassar	
Permasalahan Kawasan		
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani		
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan		
c. Akses jalan banyak yang buruk		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	30% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi Penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cakupan pelayanan	80% populasi Cakupanair minum
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	20% area yang tidak terjadi genangan
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki pesyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	c. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	d. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

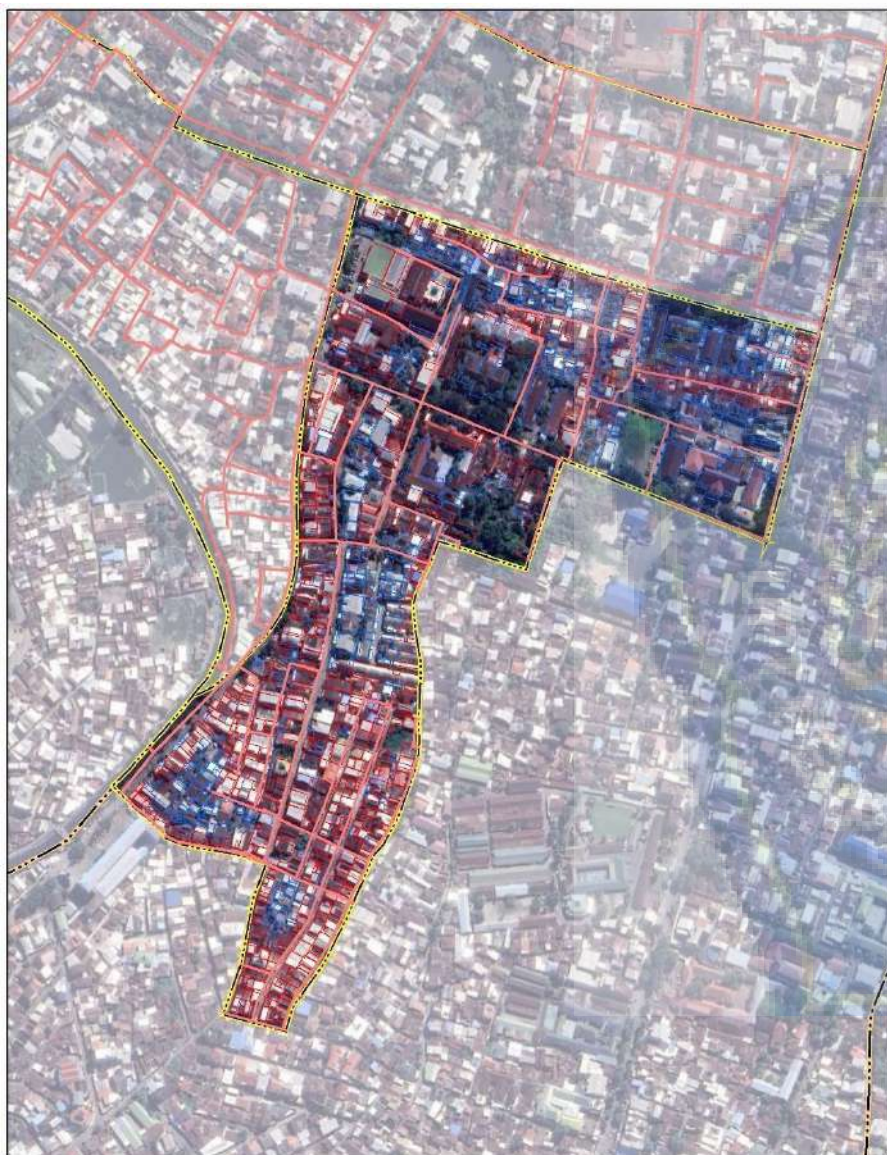




Kelurahan Panambungan		
Jumlah penduduk	11.086 jiwa	
Kelurahan	Panambungan	
Kecamatan	Mariso	
Kota	Makassar	
Permasalahan Kawasan		
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani		
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	40% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi Penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cakupan pelayanan	80% populasiCakupanair minum
Kondisi drainase lingkungan	a. Cakupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	20% area yang tidak terjadi genangan
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaanair limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	c. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	d. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Dokumentasi





Kelurahan Tamarunang		
Jumlah penduduk	6.260 jiwa	
Kelurahan	Tamarunang	
Kecamatan	Mariso	
Kota	Makassar	
Permasalahan Kawasan		
a. Masih banyaknya drainase yang belum terlayani		
b. Keteraturan bangunan yang tidak sesuai dengan teknis bangunan		
Penilaian Kekumuhan (Fisik)		
Aspek	Kriteria dan indikator	Parameter
Kondisi bangunan	a. Keteraturan Bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	b. Kepadatan Bangunan	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan
	c. persyaratan Teknis	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
Kondisi jalan lingkungan	a. Cukupan Pelayanan	45% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas jalan	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
Kondisi Penyediaan air minum	a. Akses air minum	80% populasi mengakses air minum
	b. Cukupan pelayanan	80% populasiCakupanair minum
Kondisi drainaselingkungan	a. Cukupan Pelayanan	50% area tidak tersedia drainase lingkungan
	b. Area terjadi genangan	20% area tidak terjadi genangan
	c. Kualitas Konstruksi	70% area memiliki kualitas Konstruksi drainase lingkungan
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem persyaratan teknis	20% area memiliki pesyaratan teknis
	b. Sarpras sesuai persyaratan teknis	20% area memiliki sarana sesuai persyaratan teknis
Kondisi pengelolaan sampah	a. Sarpras sesuai persyaratan teknis	30% area memiliki persyaratan teknis
	b. Sistem persyaratan teknis	50% area memiliki sistem persyaratan teknis
Kondisi proteksi kebakaran	a. Cakupan pelayanan prasarana	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	b. Cakupan pelayanan sarana	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran



Tabel 4. 5 Analisis Skoring Kecamatan Mariso

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
1. Kondisi Bangunan.	a. Ketidakteraturan Bangunan	Tidak memenuhi keteraturan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengatur bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada zona	50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	Interpretasi Foto udara, observasi
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	- KDB melebihi ketentuan RDTR, dan / atau RTBL - KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan / atau RTBL	55% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	Observasi
	c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: - Pengendalian dampak lingkungan - Keselamat gedung bangunan - Kesehatan bangunan	50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	Observasi
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	40% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	Observasi
	b. Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	Ada beberapa jalan lingkungan yang terjadi kerusakan permukaan jalan pada perumahan atau permukiman	50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
3. Kondisi penyedia air bersih	a. Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat hampir 100% sudah terpenuhi air bersih	10% populasi yang sudah mengakses air minum	1	Observasi
	b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu terpenuhi	Ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan subur alami dan sumur bor	20% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih	1	Observasi
4. Kondisi drainase lingkungan	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Drainase lingkungan sudah tersedia	50% drainase lingkungan sudah tersedia	1	Observasi
	b. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Drainase lingkungan sangat kecil dan tidak mampu mengalirkan limbah	20% terkadang drainase lingkungan tersumbat yang mengakibatkan terjadinya genangan air	1	Observasi
	c. Kualitas Konstruksi drainase lingkungan buruk	Ada beberapa Konstruksi drainase sangat buruk	50% konstruksi drainase lingkungan sangat buruk	1	Observasi
5. Kondisi pengelolaan Air Limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Sistem pengelolaan air limbah di lo konstruksi asi tidak terpenuhi	30% pengelolaan air limbah tidak terpenuhi	1	Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada lokasi permukiman dimana: - Kloset tidak terhubung dengan tangki - Tidak memiliki tempat pengelolaan limbah	30% area tidak memiliki sarana dan prasarana tidak sesuai persyaratan	1	Observasi
6. Kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi tidak sesuai dengan persyaratan - Tidak adanya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik - Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	30% area memiliki prasarana dan sarana yang tidak memenuhi persyaratan	1	Observasi
	b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan teknis - Pewadahan dan pemilahan domestik - Pengumpulan lingkungan - Pengangkutan lingkungan - Pengelolaan lingkungan	30% area tidak memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	Observasi
7. Kondisi proteksi kebakaran	1. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu : - Pasokan air - Jalan lingkungan - Sarana komunikasi	100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	Data sekunder dinas pemadam kebakaran Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		Data sistem proteksi kebakaran lingkungan			
	2. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu: - Alat Pemadam Api Ringan(APAR) - Kendaraan pemadam kebakaran	100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Data sekunder dinas pemadam kebakaran , Observasi
			Total Nilai	26	
			Tingkat Kekumuhan	Kumuh Ringan	

Sumber: Analisis penulis

BATAS AMBANG NILAI KEKUMUHAN

60-95 : KUMUH BERAT
38 – 59 KUMUH SEDANG
16 – 37 KUMUH RINGAN
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH

Hasil Analisis Skoring Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan hasil analisis skoring yang dilakukan pada kawasan permukiman kumuh di kecamatan mariso, diperoleh hasil sebagai berikut:

Kecamatan Mariso terdiri dari 9 kelurahan tetapi yang masuk kategori kawasan kumuh Cuma 8 kelurahan yaitu: kelurahan bontorannu, kelurahan mattoangin, kelurahan lette, kelurahan kampung buyang, kelurahan kunjung mae, kelurahan tamarunang, kelurahan mariso dan kelurahan panambungan.

Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa kondisi kekumuhan di wilayah ini berada pada tingkat kekumuhan ringan, aspek penilaian meliputi kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan proteksi kebakaran

Dari keseluruhan indikator mayoritas kelurahan di Kecamatan Mariso memperlihatkan permasalahan pada kualitas infrastruktur dasar, namun belum mencapai tingkat sedang dan berat, dengan demikian kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso dikategorikan sebagai kawasan kumuh ringan yang merupakan upayah peningkatan kualitas lingkungan, terutama melalui perbaikan infrastruktur permukiman dan pelayanan dasar.

10. Analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni, fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, secara standar teknis lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. SPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang memadai dan terjangkau.

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu analisis yang bisa mengetahui sarana prasarana yang ada di kawasan permukiman yang baik dan kurang baik, standar pelayanan minimal juga merupakan salah satu pedoman yang dipakai untuk suatu pencegahan dan peningkatan kualitas suatu permukiman.

Tabel 4. 6 Analisis Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Mariso

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
1.	Bangunan	Keteraturan bangunan yang ada di lokasi penelitian sangat tidak teratur, bangunan yang saling berdempetan dan tidak ada jarak antara bangunan satu dengan bangunan lain nya, bangunan yang teratur sesuai dengan teknis	• Sosialisasikan terkait aturan garis sempadan bangunan • Sosialisasikan, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat	• Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 4 m pada lantai dasar, dan pada setiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarak bebas di atasnya ditambah 0.5 m dari jarak bebas lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas terjauh 12,5 m. • Sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada keduanya sisi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				samping kiri dan kanan serta bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan.	
2.	Jalan Lingkungan	Jalan lingkungan yang ada di kawasan penelitian tidak sesuai dengan pedoman jalan	- Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat - Pendampingan masyarakat	Standar jalan lingkungan memiliki beberapa indikator yaitu: bahu jalan 0.5 m, trotoar 0.5 m, daerah manfaat jalan 3.5-40 m, daerah milik jalan 4.0 m, daerah pengawasan jalan 4.0 m, dan garis sempadan bangunan 2.0m	SNI 03-1733-2004
3.	Air bersih	Kebutuhan air bersih yang ada di kawasan permukiman kumuh di kecamatan mariso, ada beberapa kawasan yang tidak terlayani air bersih,	- Sosialisasi air bersih dan air layak minum - Perlindungan area tangkapan air	Tentukan sistem Penyediaan air bersih dengan Kapasitas minimum untuk melayani kebutuhan perumahan adalah 150 liter/orang/hari, kapasitas minimum untuk kran umum 30 liter/orang/hari. Lingkungan perumahan harus mendapatkan air bersih yang cukup dari	SNI 03-6981-2004

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				perusahaan air minum dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau <i>fiber glass</i>	
4.	Drainase	Kondisi drainase kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso, ada beberapa kawasan yang memiliki drainase yang layak dan ada juga beberapa di kawasan yang drainasenya tidak berfungsi dengan baik atau buntu	• Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada • Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat • Sosialisasi budaya hidup sehat serta pemeliharaan drainase	Aspek Hidrologi • Penentuan debit direncana agar dihitung melalui lengkungan kekerapan durasi deras hujan. • Penentuan debit desain dan tinggi jagaan agar didasarkan pada: macam kota (kota-raya, kota-besar kota-sedang dan kota-kecil), macam daerah (daerah perdagangan, daerah industri, dan daerah	SNI 02-2406-1991

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				permukiman), macam saluran (saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran jalan bebas hambatan, saluran jalan arteri dan lain-lain). • Penetapan karakteristik daerah aliran berupa luas daerah aliran, koefisiensi aliran, dan penetapan tinggi jagaan agar didasarkan pada macam kota-raya, kota-besar, kota-sedang, dan kota-kecil, daerah perdagangan, daerah industri, dan daerah permukiman. • Drainase perkotaan yang menggunakan	

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				bangunan stasiun pompa, perlu mempertimbangkan penyediaan waduk atau kolam tendon dan memperhitungkan volume total aliran serta waktu konsentrasi curah hujan. Aspek Hidraulik • Kecepatan maksimum aliran agar ditentukan tidak lebih besar daripada kecepatan maksimum yang diizinkan sehingga tidak terjadi kerusakan. • Kecepatan minimum aliran agar ditentukan tidak lebih kecil daripada kecepatan minimum yang	

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				diizinkan sehingga tidak terjadi pengendapan dan pertumbuhan tanaman air. • Bentuk penampang saluran agar dipilih berupa segi empat, trapesium, lingkaran, bagian dari lingkaran, bulat telur, bagian dari bulat telur, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut. • Saluran sebaiknya dibuat dengan bentuk majemuk, terdiri atas saluran kecil dan saluran besar, guna mengurangi beban pemeliharaan. • Kelancaran pengaliran air dari jalan ke dalam	

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				saluran drainase agar dilewatkan. • Dimensi bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, pintu air dan lubang kota, daerah dan macam saluran	
5.	Air Limbah	Masyarakat yang ada di kawasan permukiman kumuh di kecamatan Mariso yang memiliki pengelolaan air limbah nya ada beberapa kawasan yang pengelolaan air limbahnya yang tidak sesuai dengan pelayanan teknis.	• Sosialisasi hidup sehat • Penyediaan sarana yang memadai • Program sanitasi berbasis masyarakat • Pendataan kepemilikan jamban	• Dilengkapi dengan sistem air limbah kota komunal atau individual sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Air limbah harus melalui sistem pengelolaan sebelum dibuang ke perairan terbuka sesuai dengan ketentuan berlaku • Hitung volume air limbah hunian rumah tangga berdasarkan kepadatan	SNI 03-6981-2004

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				penduduk yang direncanakan. Tentukan sistem air limbah pembangunan sesuai dengan data topografi, sistem pembuangan air limbah ditentukan sesuai dengan kondisi setempat, bisa dilakukan dengan sistem pembuangan air limbah komunal di dalam tapak atau sistem individual.	
6.	Persampahan	Persampahan yang ada di kawasan permukiman kumuh di kecamatan Mariso yang tidak ada terdapat pengelolaan sampah nya, dan ada juga beberapa kawasan yang sudah ada pengelolaan persampahan nya .	- Pemeliharaan sampah sejak dini - Pemanfaatan sampah bernilai ekonomi - Sosialisasi kepada warga	Pengumpulan Sampah - Kapasitas minimum tempat sampah lingkungan rumah tangga volume 0,02m³ - Tempat sampah dibuat dari bahan rapat air.	SNI 03-6981-2004

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
				• Penempatan tempat sampah harus mudah dicapai oleh petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas Pengangkutan sampah • Tersedia fasilitas pengangkutan sampah • Pengangkutan dari tiap-tiap rumah dilakukan maksimum dua hari sekali. Pembuangan sampah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara teknis pengelolaan sampah perkotaan dan peraturan mengenai tata cara pengelolaan sampah di permukiman	

NO	Aspek	Kondisi terkini lokasi	Kebutuhan Penanganan		Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
			Pencegahan	Peningkatan	
7.	Proteksi Kebakaran	Proteksi kebakaran di kawasan permukiman kumuh kecamatan mariso, tidak ada terdapat kran kebakaran di kawasan permukiman kumuh kecamatan mariso	- Sosialisasikan dan edukasi kepada warga tentang penggunaan alat api ringan - Pemberian keterampilan pemadam api ringan	Untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100 meter. Untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200 meter.	SNI 03-6981-2004

Sumber: Analisis Penulis

Analisis Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pemenuhan dasar permukiman di Kecamatan Mariso, Khususnya pada 8 kelurahan yang termasuk kawasan permukiman kumuh

1. Ketersediaan Air Minum

Akses air bersih sudah tersedia, namun distribusinya yang belum merata, ada sebagian warga yang masih mengandalkan sumur galian atau membeli air bersih.

2. Sistem drainase

Drainase sudah ada di kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso, tetapi sebagian tersumbat tidak terhubung dengan baik

3. Pengelolaan persampahan

Layanan pengangkutan sampah tersedia tetapi keterbatasan armada dan TPS menyebabkan sebagian sampah dibuang ke lahan kosong

4. Pengelolaan air limbah

Sebagian besar rumah sudah memiliki septic tank, namun masih ada yang memiliki sambungan septic tank yang bersama

5. Jalan lingkungan

Jaringan jalan lingkungan sudah ada tetapi sebagian besar dalam kondisi rusak ringan, sempit dan tidak memiliki pekerasan yang memadai

6. Proteksi kebakaran

Akses kendaraan pemadam kebakaran sulit karena jalan lingkungan sempit. Sarana hidran dan alat proteksi kebakaran tidak tersedia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di pembahasan yang telah dilakukan pada kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pembobotan, Mengetahui kondisi dan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar, yaitu kecamatan Mariso memiliki tingkat kekumuhan dengan hasil penilaian kumuh Ringan, Kelurahan yang termasuk pada lokasi kawasan permukiman kumuh yaitu antara lain : Kelurahan Kampung Buyang, Kelurahan Mattoangin, Kelurahan Mariso, Kelurahan Lette, Kelurahan Bontorannu, kelurahan Tamarunang, Kelurahan Panambungan, dan Kelurahan Kunjung Mae. Variabel yang paling dominan menjadi masalah di Kecamatan Mariso yaitu masalah dengan drainase, Air Limbah, keteruran bangunan, persampahan, dan proteksi Kebakaran.
2. Berdasarkan hasil analisis standar pelayanan minimal (SPM), dengan menganalisis arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Mariso Kota Makassar, antara lain:

a. Bangunan

perlu memenuhi standar yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang mencakup bebas belakang, lantai dasar, tingkat bangunan, jarak bebas lantai dibawah.

b. Kondisi jalan

perlu memenuhi standar yang sesuai dengan SNI, yang memiliki bahu jalan, trotoar, daerah manfaat jalan, daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan, dan garis sempadan bangunan.

c. Air minum

Sistem Penyediaan air minum dengan Kapasitas minimum untuk melayani kebutuhan perumahan adalah 150 liter/orang/hari, kapasitas minimum untuk kran umum sebesar 30 liter/orang/hari. kebutuhan air Minum berdasarkan jumlah penduduk yang direncanakan.

d. Air limbah

Dilengkapi dengan sistem air limbah kota komunal atau individual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Air limbah harus melalui sistem pengelolaan sebelum dibuang ke perairan terbuka sesuai dengan ketentuan berlaku. Volume air limbah hunian rumah tangga berdasarkan kepadatan penduduk yang direncanakan.

e. Drainase

Penentuan debit direncanakan agar dihitung melalui lengkungan kekerapan durasi deras hujan. Penentuan debit desain dan tinggi jagaan agar didasarkan pada: jenis kota besar sebagai pusat kawasan permukiman dengan ketersediaan saluran drainase primer dan sekunder.

f. Persampahan

Penempatan tempat sampah harus mudah dicapai oleh petugas kebersihan dan tidak mengganggu lalu lintas. Pembuangan sampah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara teknis pengelolaan sampah perkotaan dan peraturan mengenai tata cara pengelolaan sampah di permukiman. Pengangkutan sampah minimal 2 kali sehari, pagi dan malam hari.

g. Proteksi kebakaran

Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai tata cara perencanaan bangunan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung. Ketentuan-ketentuan lain perihal kran sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang tata cara sistem hidran untuk bahaya kebakaran rumah dan gedung.

B. Saran

1. PEMERINTAH

- Pemerintah perlu menyusun kebijakan berbasis data lokal dan pendekatan partisipatif, seperti peraturan Walikota Tentang RP2KPKP, agar penanganan permukiman kumuh lebih terarah dan berkelanjutan
- Peningkatan infrastruktur dasar, fokus pada penyediaan air bersih, berupa kebijakan peraturan Walikota tentang sanitasi, masterplan drainase, penataan jalan lingkungan, dan penerangan sebagai prioritas utama
- Melakukan pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali bagi kawasan yang tidak memungkinkan untuk ditingkatkan kualitasnya.

2. MASYARAKAT

- Tingkat pemahaman warga tentang pentingnya menjaga kebersihan, sanitasi, dan sadar tata ruang
- Melibatkan warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) agar kebutuhan lokal benar-benar terakomodasi
- Memberikan bantuan kepada masyarakat berupa renovasi rumah dan infrastruktur secara kolektif dan transparan.

3. PENELITIAN SELANJUTNYA

- Melakukan efektivitas pendekatan berbasis komunikasi dalam pencegahan dan penataan permukiman kumuh.

Fokus pada peran warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dari pemerintah



Daftar Pustaka

- Ameliya Maghfirah, S., Rusnani Ruslan. (2022). Arahana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 129–139.
- Batara Surya, D. N. A. A., Emil Salim Rasyidi 1. (t.t.). *KEBERLANJUTAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KOMUNITAS DI KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN*.
- Donny Wahyu Wijaya. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 1–10.
- Jurnal Arsitektur. (t.t.). *Pengertian Pemukiman Kumuh, Ciri-Ciri Fisik dan Non Fisik Pemukiman Kumuh, Serta Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman Kumuh*.
- Muhammad Ikram Ulman Idris. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Fisik di Sekitar Fasilitas Pendidikan pada Kawasan Permukiman Kumuh dalam Perwujudan Lingkungan Sehat di Kelurahan Mariso Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 5166–5175.
- Nini Apriani Rumata, N. A. R. (2023). Kajian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman di Kawasan Bontorannu Kota Makassar. *Journal Of Green Complex Engineering*, 1(1), 11–19.
- Wahyu Saputra, S., Muhammad Hafiz Hermansyah. (2022). PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSI. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), 1–6.

(Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh Kota Makassar, KEPUTUSAN WALI KOTA
MAKASSAR Nomor : 2821/648/TAHUN 2022, 2022)





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : A. Muhammad Taufiq Hidayatullah

Nim : 105851102320

Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	4%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



RIWAYAT HIDUP PENULIS



A. Muhammad Taufiq Hidayatullah lahir pada tanggal 07 juli 2001 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Putra dari pasangan Bapak A. Kamal Busthanul S.sos dan Ibu Suharny Sutte. Bertempat Tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pernah Menempuh Pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2007 Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Inpres Jongaya pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan ke SMP NEGERI 26 Makassar dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan di SMK NEGERI 10 Makassar dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota pada tahun 2020. Pada saat penulis menjadi mahasiswa penulis pernah mengerjakan suatu proyek yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Yaitu Rencana Pencegahan Dan peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan Pernah Melakukan Survey di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan ketekunan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR**”.

